

**ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA  
PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)  
DI MAKASSAR**



**GANESSA DITYA TADIKA PURI  
A31105649  
AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

SKR-ETD  
PUR  
a

**2010**

**ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA  
PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)  
DI MAKASSAR**

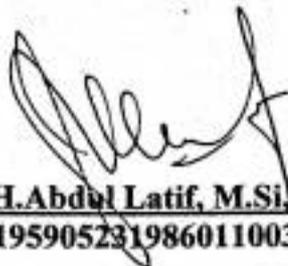
Oleh:

**GANESSA DITYA TADIKA PURI  
A31105649**

**SKRIPSI DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA EKONOMI AKUNTAN PADA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**Drs. H. Abdul Latif, M.Si, Ak**  
**Nip: 195905231986011003**

**PEMBIMBING II**



**Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si, Ak**  
**Nip : 196602201994122001**

ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA PADA  
PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)  
DI MAKASSAR

OLEH:  
GANESSA DITYA TADIKA PURI  
A 311 05 649

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 06 MEI 2010

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. Mushar Mustafa, MM, Ak	( Ketua, FE-UH )	1. ....
2. Drs. Syahrir, M.Si, Ak	( Sekretaris, FE-UH )	2. ....
3. Dra. Andi Kusumawati, M.Si, Ak	( Anggota, FE-UH )	3. ....
4. Drs. Muh. Nur Azis, MM	( Anggota, FE-UH )	4. ....
5. Drs. Muh. Achyar Ibrahim, Ak	( Anggota, FE-UH )	5. ....

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Hasanuddin  
Ketua

DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si.

Tim Penguji  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Unhas  
Ketua

Drs. Mushar Mustafa, MM, Ak

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Analisis Hasil Pengukuran Kinerja pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar.*" **Ganessa Ditya Tadika Puri (2009)** menulis Skripsi ini dengan dibimbing oleh Bapak **Drs. H. Abdul Latif, M.Si., Ak.** Selaku Pembimbing I dan Ibu **Drs. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak.** Selaku Pembimbing II.

**Keywords:** Aspek Kinerja Keuangan, Operasional, Administrasi, dan SK Meneg BUMN No. KEP-100/MBU/2002.

Penelitian yang dituangkan dalam Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui "*Kinerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan menggunakan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.*" Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu penulis menggambarkan hasil observasi dan menganalisa data-data kuantitatif yang diperoleh di lapangan.

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan hasil wawancara dan berbagai literatur yang berkembang didasari dengan teori yang mendukung hasil penelitian: Pada Aspek Kinerja Keuangan, perhitungan laba bersih PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) pada tahun 2004-2008. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat penurunan tingkat persentase laba sangat menurun dari tahun 2005 sampai 2008 karena laba bersih setelah pajak semakin menurun sehingga kemampuan kinerja perusahaan tidak dapat mengembalikan modal, menyebabkan skor mengalami penurunan. Pada aspek operasional mengalami fluktuasi skor, untuk 2006 merupakan skor terendah sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan disebabkan produktifitas tenaga kerja dan pendapatan rata-rata perkapalan kemudian kapasitas reparasi kapal sangat terbatas, fasilitas sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai untuk digunakan dan sumber daya manusia yang dimiliki kualitasnya belum memadai. Kemudian aspek administrasi mengalami penurunan pada tahun 2006, 2007, dan 2008, karena perusahaan tidak memiliki ketersediaan dana yang disebabkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman sehingga tidak ada dana yang bisa disalurkan untuk menjalankan program PUKK atau CSR.

Setelah melakukan analisis hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan sesuai dengan SK Meneg Nomor KEP-100/M-BUMN/2002, kinerja manajemen PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di tahun 2004 Tingkat Kesehatan Perusahaan "**SEHAT dengan nilai AA dengan total skor 80**", di setiap aspek dari aspek keuangan = **50**, aspek operasional = **15**, dan aspek administrasi = **15** dan tahun 2005 kebawah semakin menurun, sehingga pada tahun 2008 aspek keuangan memperoleh = **14,1**, aspek operasional = **13**, dan aspek administrasi = **8**. Oleh sebab itu, Tingkat kesehatan tahun 2008 tergolong "**KURANG SEHAT dengan nilai B dengan skor total 35,1**".

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan berkah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan strata satu untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan, hambatan, dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun berkat do'a, kerjasama dan bantuan bimbingan berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan itu dapat teratasi.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku AKP. Imam Supriadi, SH, MH dan Feyby Sandra Nani, S.Pd, serta my beloved sista Violetta J. Tadikapury dan Cyndy V. Tadikapury, selanjutnya kepada :

1. Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Dr.H.Abd.Hamid Habbe,SE,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs.H.Abd.Latif,M.Si,Ak sebagai pembimbing I dan ibu Dra.Hj. Sri Sundari,M.Si,Ak sebagai Pembimbing II, yang banyak meluangkan waktunya

dalam memberikan masukan serta kritik yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. \*trima kasih bapak dan ibu atas semuanya\*

4. Bapak Drs.H.Muallimin,M.Si,Ak selaku Penasihat Akademik atas segala masukan, bimbingan dan nasihat selama penulis menjalani kuliah serta para dosen-dosen yang telah membimbing penulis dari semester satu hingga sekarang.
5. Para pegawai Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, pa' umar, pa' safar, pa' akbar, pa' asmari, pa' haji, pa' messe, pa' budi, bu sri, telah membantu kelancaran akademik penulis, serta pa' jamal, pa' aso, pa' taru' dan pegawai lainnya
6. Direksi dan seluruh staf PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar yang telah membantu dalam menyediakan data dan informasi terkait dengan penulisan ini, terkhusus buat bapak isa, pak bur, pak edi, pak wisnu yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Moh. Reza Saputra yang paling banyak membantu mulai dari T4 penelitian sampai ke dosen pembimbing sama-sama (thanks banget ya bang), dan masita "itacinta" yang sama-sama berjuang mencari tempat penelitian sampai ditolak beberapa kali, akhirnya kita dapat di PT.IKI sama-sama (haha..'berpanas-panasan' perjuangan tak pernah ku lupakan),uUpzz especially 4 u irmayanti idris "keep spirit beb"
8. Teman2 karantina kompre I en II ; tentor2 yg kuat hdpi qt2,,\* farid SE, en fahru SE\* fikar, dedi, nunu, ai , mirna, k' friska, yunda, appy , qy2 , lina, uli, cikqu, rati, karas, atal, en ka zulham("tengkiuw editannya ka), tri SE, ari, ardi, aey, oppi, ulfa,

novi, tere, wati, mutia, peni SE, Mutia gau SE, dian anggarda, eterland, pite, k' irsul, k' iccank, k' isti, k' tomo.,angkatan 05 REPA,RESO,...n senior angk.04 RESO(yang tak dpt disebutkan namanya satu per satu) eN \*teman2 kompreq anak REPA, fira, fitriah, iping, nunu, k iin, inna, k ilham.,sm2 berjuang...\*

9. Teguh, santi, suneth, om agung pratama, arif 'repa', azmi, dillah, musk 'repa',ari, andri, eki asrifa, linami, nurul, yayank, faat, wulan, yang mewakili angk. 06 dan 07 yang memberi semangat, serta pertanyaan 'Kapan lulus?' akhirnya semuanya selesai juga dan semua junior angkatan dibawah ku....'*do the best, talk less do more but don't speccless* aja ya...'
10. *especially for the Ztoner* 'isya, tiwi, rini, mamay, itha, n mas didonk 'be success U all 'bacrit', eka, asti, muchan, qismall N ira \*teman2 semasa sekolah dlu....sampai skr kalian masukkan untuk membangunkan smangatku dalam pengerjaan skripsi ini 'nindy nan jauh disana...
11. Andi Armawan Abdullah SE, tengkiuw smwnya JELEK... \* jgn suka mengeluh, jalani apa adanya sj \*

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi kita semua dan penulis berpesan kepada orang yang akan buat skripsi jangan pernah ikuti rasa malas dalam dirimu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat 'harus kalian kalahkan'.....tetap cari inspirasi dalam pengerjaan skripsi dan pengembangan ilmu pengetahuan

Makassar, Mei 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Masalah Pokok .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian dan Manfaat Pengukuran Kinerja .....	7
2.2 Syarat Pengukuran Kinerja .....	9
2.3 Indikator-indikator Pengukuran Kinerja .....	11
2.4 Definisi Laporan Keuangan dan Analisa Laporan Keuangan .....	13
2.5 Pengukuran Kinerja Badan Usaha Milik Negara .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Daerah penelitian .....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	29

3.3	Jenis & Sumber data .....	30
3.4	Metode Analisis .....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>		
4.1	Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan .....	37
4.2	Visi dan Misi Perusahaan .....	41
4.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	42
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>		
5.1	Aspek Kinerja Keuangan .....	47
5.2	Aspek Kinerja Operasional .....	58
5.3	Aspek Kinerja Administrasi .....	59
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
6.1	Kesimpulan .....	65
6.2	Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, digariskan bahwa perseroan terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, sehingga perseroan terbatas diharapkan mampu berfungsi secara sehat berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

PT Industri Kapal Indonesia (Persero) merupakan perusahaan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam era globalisasi saat ini kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing BUMN. Dimana hal ini menyebabkan persaingan antara perusahaan-perusahaan semakin ketat. Perusahaan yang sehat akan mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan lain yang komoditi bisnisnya sejenis, sedangkan perusahaan yang mengalami kondisi kurang atau tidak sehat akan kesulitan dalam menghadapi persaingan. Agar suatu perusahaan dapat tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis saat ini, perusahaan harus terus berupaya untuk menyusun dan menyempurnakan strategi-

strategi bisnis mereka. Untuk dapat menyusun dan menjalankan strategi dengan baik, diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja.

Kinerja sebagai refleksi dari pencapaian keberhasilan dan kemunduran suatu perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Oleh karena penulisan ini ditujukan pada kinerja perusahaan, maka kinerja diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas kegiatan yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Kinerja perusahaan menurut Munawir S. (1988) dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kinerja operasi antara lain meliputi volume penjualan yang dicapai.
2. Kinerja keuangan yang meliputi :
  - a. Likuiditas yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.
  - b. Solvabilitas yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya bila perusahaan tersebut dilikuidasi
  - c. Rentabilitas yakni kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
  - d. Stabilitas usaha yakni kemampuan perusahaan melakukan usahannya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan untuk membayar deviden.

Kondisi kesehatan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangannya. Laporan keuangan sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh *stake holder* antara lain pemegang saham, manajer, karyawan, investor, kreditur, supplier, masyarakat. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan dan berkembang.

Suatu sistem penilaian kinerja yang baik adalah sistem yang dapat menilai kinerja seluruh komponen esensial perusahaan, sehingga sistem tersebut harus mampu disesuaikan dengan keadaan dan kedudukan perusahaan dalam bisnisnya. Penilaian kinerja yang paling sering digunakan adalah penilaian kinerja dengan tolok ukur keuangan *Economic Value Added (EVA)*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Equity (ROE)*, dan lain-lain. Dimulai dengan suatu premis bahwa tolok ukur keuangan yang selama ini digunakan menyebabkan organisasi melakukan tindakan yang keliru akibat bias informasi yang digunakan, sehingga pengukuran kinerja hanya dengan tolok ukur keuangan saja dianggap sudah tidak memadai lagi untuk diterapkan.

Akibat banyaknya kekeliruan tindakan yang berfokus hanya pada orientasi keuangan, karena hanya menyediakan informasi masa lalu dan tidak mampu untuk memprediksi kondisi masa depan sehingga tidak sesuai dengan implementasi dan pengendalian rencana strategi perusahaan. Terdapat kelemahan dalam pengukuran kinerja dengan tolok ukur keuangan, yaitu bersifat historis dimana pengukuran kinerja dengan tolok ukur keuangan hanya menggambarkan kejadian atau peristiwa



organisasi masa lalu, tetapi tidak menggambarkan kejadian atau peristiwa saat ini.

Hal tersebut bukan indikator yang baik untuk mengukur kinerja masa depan.

BUMN infrastruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi, (a) perakitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik, (b) pengadaan dan atau pengoprasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang laut, udara atau kereta api, (c) Jalan, dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan , laut, sungai, danau, lapangan terbang atau bandara, (d) Bendungan dan irigasi. Sedangkan BUMN non infrastruktur adalah BUMN yang bidang usahanya di luar bidang usaha sebagaimana yang disebut pada BUMN infra struktur.

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah jenis BUMN non infrastruktur dalam bidang penunjang konstruksi dan jalan tol yang berada di Makassar. Untuk senantiasa mempertahankan dan mengembangkan usahanya, maka perlu diketahui perkembangan kinerjanya. Dalam tiga tahun ini, perusahaan yang bergerak dalam reparasi dan pembuatan kapal ini mengalami krisis, di sini penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan kinerja jika pengukuran kinerjanya diukur dengan menggunakan SK Meneg BUMN Nomor KEP-100/MBU/ 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN.

Oleh karena itu, setelah memahami pentingnya pengukuran kinerja terhadap perusahaan, maka mendorong penulis untuk membuat karya tulis dengan mengkaji dan mengadakan suatu penelitian lebih dalam mengenai penulisan dalam bentuk

skripsi dengan judul ***“Analisis Hasil Pengukuran Kinerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar.”***

## **1.2 Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah bagaimana kinerja perusahaan dengan menggunakan SK Meneg Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia Nomor: Kep-100/MBU/2002 pada PT. Industri Kapal Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kinerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan Menggunakan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui jenis-jenis indikator yg memberikan nilai dalam pencapaian aspek kinerja dan memberikan interpretasi atas hasil kinerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) yang telah dicapai perusahaan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengukur kinerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), guna pengambilan keputusan dan pengendalian dimasa yang akan datang.

- b. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan sebagai bahan masukan, literatur, dan referensi bagi kalangan mahasiswa dalam menambah wawasan dan ingin mengevaluasi kinerja BUMN.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian dan Manfaat Pengukuran Kinerja**

Kinerja merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki.

Menurut Mulyadi (2001:227), pengukuran kinerja adalah

*Penentuan atau penilaian secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar, atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.*

Sedangkan menurut Atkinson, Kaplan, dan Young (2001:43)

*Performance measurement, a major management accounting and control process used to evaluate that performance of a manager, activity, or organization unit.*

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bagi perusahaan dengan adanya sistem pengukuran kinerja akan membantu para pengambil keputusan dalam menentukan berbagai keputusan dan tindakan strategis dalam perusahaan.

2. Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu usaha untuk mencapai keefektifan melalui aktifitas-aktifitas yang ada dalam perusahaan yang menjanjikan peranannya dalam perusahaan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sendiri merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang mencakup baik tindakan yang mengimplikasikan keputusan perencanaan maupun kinerja pegawai serta operasinya. Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta pemberian penghargaan.

Pengukuran menyeluruh yang terbaik dapat ditunjukkan dengan memperlihatkan keseimbangan antara beberapa kategori, seperti :

- a. *Effectiveness* yaitu apakah hal-hal yang dikerjakan sudah tepat dengan membandingkan output aktual.
- b. *Efficiency* yaitu dengan melihat apakah yang dikerjakan sudah baik dan sempurna dan membandingkan input yang direncanakan dengan input yang aktual.
- c. *Productivity* yaitu dengan melihat banyaknya output yang dihasilkan dari input yang ada.
- d. *Utilization* yaitu dengan melihat , bagaimana penggunaan sumber daya yang ada di dalam perusahaan, seperti persediaan, *asset turnover*, dan lain-lain.

## 2.2 Syarat Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur suatu kinerja yang baik ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Menurut Hongren, Foster dan Datar (1997 : 341) dalam buku akuntansi biaya dengan pendekatan manajerial mengemukakan bahwa kriteria suatu pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut :

1. *Related to the goals of the organition.*

Pengukuran kinerja yang berkaitan dengan tujuan organisasi akan memberikan arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai perusahaan.

2. *Balanced long term and short term concern*

Dapat menjaga keselarasan pencapaian tujuan jangka pendek berupa laba bertahan dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan.

3. *Reflect the management key activity.*

Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Dari hasil pengukuran kinerja ini dapat dilihat prestasi apa saja yang telah berhasil manajer di ukur untuk kemajuan perusahaan.

4. *Be effect to the managers and employees activities.*

Pengukuran kinerja yang baik akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat, lebih baik karena mereka akan menyadari aktivitas mereka merupakan salah satu komponen penyebab kemajuan perusahaan.

5. *Be Readily understood by menegers and employees.*

Pengukuran kinerja yang mudah dimengerti oleh karyawan akan membuat karyawan mudah mengetahui tujuan perusahaan dan mencoba mengetahui apa yang menjadi tujuan perusahaan.

6. *Be used in evaluating and rewarding managers and employees.*

Pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dan member penghargaan kepada karyawan. Apabila hasil pengukuran kinerja sesuai yang ingin dicapai oleh perusahaan, perusahaan dapat memberikan penghargaan.

7. *Be reasonable objective and easily measured.*

Karena akan memudahkan segenap komponen perusahaan dalam memahami tujuan perusahaan yang nantinya akan memudahkan perusahaan untuk mewujudkan apa yang diinginkan untuk kemampuan perusahaan.

8. *Be used consistently and regularly.*

Penggunaan pengukuran kinerja yang berubah-ubah akan memberikan arah yang tidak jelas untuk menilai kemajuan perusahaan untuk mewujudkan apa yang diinginkan untuk kemajuan perusahaan.

Dengan kata lain, pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah:

1. Memberikan kontribusi pada suatu bagian (divisi) dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
2. Dapat digunakan untuk mengukur suatu prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi tersebut.
3. Memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dari divisi-divisi dibawahnya.
4. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal.

Tujuan utama dalam pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.

### **2.3 Indikator-indikator Pengukuran Kinerja**

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa *critical performance indicators* merupakan indikator dalam pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan. Faktor-faktor ini merupakan elemen-elemen dari kinerja perusahaan. Faktor-faktor ini merupakan elemen-elemen dari kinerja yang dibutuhkan untuk keberhasilan perusahaan dan berhubungan dengan kemampuan operasional perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelanggan.

Pengukuran kinerja harus mudah untuk dipahami dan dirancang bagi orang-orang yang mengatur aktivitas-aktivitas perusahaan. Sistem pengukuran kinerja yang efektif dapat membantu manager yang mengatur rantai nilai untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan kemudian menyarankan solusinya.

#### **2.4 Definisi Laporan Keuangan dan Analisa Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut SAK adalah :

*Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana) catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.*

Pengertian Analisis laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah:

*Analisis laporan keuangan adalah analisis terhadap neraca, dan perhitungan laba-rugi serta segala keterangan-keterangan yang dimuat di dalam lampiran-lampirannya untuk mengetahui gambaran tentang posisi keuangan dan perkembangan usaha perusahaan.*

Dari proses definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisa laporan keuangan merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan itu serta untuk memprediksi kemungkinan kondisi kerja perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan.

#### **2.5 Pengukuran Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Penilaian kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik

*Critical performance indicators* tersebut menurut Atkinson, Banker, Kaplan, dan Young dalam *Management Accounting* (2001:43-47) adalah:

a. *Consider each activity and the organization itself from the customer's perspective*

Suatu sistem pengukuran kinerja harus menjadikan perspektif pelanggan sebagai indikator penting. Hal ini dikarenakan untuk mendukung pengendalian operasional, ukuran-ukuran kinerja perusahaan harus mengkomunikasikan dan meringkas semua hal yang bersifat kritis terhadap keberhasilan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dari target konsumen.

b. *Evaluation each activity using customer-validated performance measures.*

Salah satu alat yang dapat digunakan adalah *customer-validated performance measures* yang berguna untuk mencerminkan kebutuhan konsumen dan untuk membantu karyawan mengatur proses rantai nilai dan aktivitas dalam rangka untuk memuaskan konsumen.

c. *Consider all facets of activity performance that affect customers and are therefore reflecting comprehensive information.*

Suatu sistem pengukuran kinerja yang efektif harus mengandung semua informasi-informasi yang cukup dan komprehensif serta relevan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur kinerja perusahaan.

d. *Provide feedback to help organization members identify problems and opportunities for improvement.*

Indonesia Nomor Kep/100/MBU/2002. Bentuk kinerja dalam keputusan tersebut terdiri atas kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja administrasi.

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 indikator aspek operasional ditentukan sendiri oleh perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Indikator tersebut berasal dari usulan dan penilaian dari Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan.

Karena adanya kendala keterbatasan perolehan data perusahaan menyangkut usulan dan pertimbangan Komisaris/Dewan pengawasan perusahaan mengenai indikator aspek kinerja operasional, maka penulis selain menggunakan SK Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 sebagai model analisis utama, sebagai bahan penelitian.

**a. Analisis Kinerja Keuangan Menurut SK Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002.**

**1. Nilai/Bobot**

BUMN Infrastruktur : 50

BUMN Non-Infrastruktur : 70

## 2. Indikator dan Nilai/Bobot

**Tabel 2.1**  
**Bobot Indikator Kinerja Keuangan**

Indikator	BOBOT	
	Infra	Non Infra
1. Return On Equity (ROE)	15	20
2. Return On Investment (ROI)	10	15
3. Cash Ratio (CR)	3	5
4. Current Ratio (CuR)	4	5
5. Collection Periods (CP)	4	5
6. Inventory Turnover (ITO)	4	5
7. Total Asset Turnover (TATO)	4	5
8. Total Modal Sendiri Thd Total Aset(TMS-TA)	6	10
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

Persamaan yang digunakan untuk menghitung indikator

**Return On Equity (ROE)** dengan rumus :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

**Return On Investment (ROI)** dengan rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ebit} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

**Cash Ratio (CR)** dengan rumus :

$$CR = \frac{\text{Kas + Bank + Surat berharga jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

**Current Ratio (CuR)** dengan rumus :

$$CuR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

**Collection Period (CP)** dengan rumus :

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

**Inventory Turnover (ITO)** dengan rumus :

$$ITO = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

**Total Assets Turnover (TATO)** dengan rumus :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

**Total Modal Sendiri Terhadap Modal Aset (TMS-TA)** dengan rumus :

$$TMS-TA = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

### 3. Batasan Indikator dan Nilainya

#### Return On Equity (ROE)

**Tabel 2.2**  
**Bobot Indikator ROE**

ROE (%)			Skor	
			Infra	Non Infra
15.0	<ROE		15.0	20.0
13.0	<ROE<=	15.0	13.5	18.0
11.0	<ROE<=	13.0	12.0	16.0
9.0	<ROE<=	11.0	10.5	14.0
7.9	<ROE<=	9.0	9.0	12.0
6.0	<ROE<=	7.9	7.5	10.0
5.3	<ROE<=	6.6	6.0	8.5
4.0	<ROE<=	5.3	5.0	7.0
2.5	<ROE<=	4.0	4.0	5.5
1.0	<ROE<=	2.5	3.0	4.0
0.0	<ROE<=	1.0	1.5	2.0
	<ROE<	0.0	1.0	0.0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

## Return On Investment (ROI)

**Tabel 2.3**  
**Bobot Indikator ROI**

ROI (%)			Skor	
			Infra	Non Infra
18.0	<ROI		10.0	15.0
15.0	<ROI<=	18.0	9.0	13.5
13.0	<ROI<=	15.0	8.0	12.0
12.0	<ROI<=	13.0	7.0	10.5
10.5	<ROI<=	12.0	6.0	9.0
9.0	<ROI<=	10.5	5.0	7.5
7.0	<ROI<=	9.0	4.0	6.0
5.0	<ROI<=	7.0	3.5	5.0
3.0	<ROI<=	5.0	3.0	4.0
1.0	<ROI<=	3.0	2.5	3.0
0.0	<ROI<=	1.0	2.0	2.0
	<ROI<	0.0	0.0	1.0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

## Cash Ratio (CR)

**Tabel 2.4**  
**Bobot Indikator CR**

CR (%)			Skor	
			Infra	Non Infra
	CR>=	35.0	3.0	5.0
25.0	<=CR<	35.0	2.5	4.0
15.0	<=CR<	25.0	2.0	3.0
10.0	<=CR<	15.0	1.5	2.0
5.0	<=CR<	10.0	1.0	1.0
0.0	<=CR<	5.0	0.0	0.0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

**Current Ratio (CuR)**

**Tabel 2.5  
Bobot Indikator CuR**

CuR (%)			Skor	
			Infra	Non Infra
125	<=CuR		3.0	5.0
110	<=CuR<	125	2.5	4.0
100	<=CuR<	110	2.0	3.0
95	<=CuR<	100	1.5	2.0
90	<=CuR<	95	1.0	1.0
	<=CuR<	90	0.0	0.0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

**Collection Periods (CP)**

**Tabel 2.6  
Bobot Indikator COP**

CP (Hari)			Perbaikan CP		Skor		
			(Hari)		Infra	Non Infra	
	CP<=	60		HARI>	35	4.0	5.0
60	<CP<=	90	30	< HARI<=	35	3.5	4.5
90	<CP<=	120	25	< HARI<=	30	3.0	4.0
120	<CP<=	150	20	< HARI<=	25	2.5	3.5
150	<CP<=	180	15	< HARI<=	20	2.0	3.0
180	<CP<=	210	10	< HARI<=	15	1.6	2.4
210	<CP<=	240	6	< HARI<=	10	1.2	1.8
240	<CP<=	270	3	< HARI<=	6	0.8	1.2
270	<CP<=	300	1	< HARI<=	3	0.4	0.6
300	<CP		0	< HARI<=	1	0.0	0.0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

### Inventory Turnover (ITO)

**Tabel 2.7**  
**Bobot Indikator ITO**

ITO (Hari)			Perbaikan ITO			Skor	
			(Hari)			Infra	Non Infra
	ITO <=	60		< HARI		4.0	5.0
60	< ITO <=	90	30	< HARI <=	35	3.5	4.5
90	< ITO <=	120	25	< HARI <=	30	3.0	4.0
120	< ITO <=	150	20	< HARI <=	25	2.5	3.5
150	< ITO <=	180	15	< HARI <=	20	2.0	3.0
180	< ITO <=	210	10	< HARI <=	15	1.6	2.4
210	< ITO <=	240	6	< HARI <=	10	1.2	1.8
240	< ITO <=	270	3	< HARI <=	6	0.8	1.2
270	< ITO <=	300	1	< HARI <=	3	0.4	0.6
300	< ITO		0	< HARI <=	1	0.0	0.0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

### Total Asset Turnover (TATO)

**Tabel 2.8**  
**Bobot Indikator TATO**

ITO (Hari)			Perbaikan ITO			Skor	
			TATO (%)			Infra	Non Infra
	TATO <=		20	< TATO		4.0	5.0
60	< TATO <=	120	15	< TATO <=	20	3.5	4.5
90	< TATO <=	105	10	< TATO <=	15	3.0	4.0
120	< TATO <=	90	5	< TATO <=	10	2.5	3.5
150	< TATO <=	75	0	< TATO <=	5	2.0	3.0
180	< TATO <=	60		< TATO <=	0	1.5	2.5
210	< TATO <=	40		< TATO <	0	1.0	2.0
240	< TATO <=	20		< TATO <	0	0.5	1.5

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

## Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS-TA)

**Tabel 2.9**  
**Bobot Indikator TMS-TA**

TMS terhadap TA (%)			Skor	
			Infra	Non Infra
	TMS <	0	0.0	0.0
.0	<= TMS-TA <	10	2.0	4.0
10	<= TMS-TA <	20	3.0	6.0
20	<= TMS-TA <	30	4.0	7.25
30	<= TMS-TA <	40	6.0	10.0
40	<= TMS-TA <	50	5.5	9.0
50	<= TMS-TA <	60	5.0	8.5
60	<= TMS-TA <	70	4.5	8.0
70	<= TMS-TA <	80	4.25	7.5
80	<= TMS-TA <	90	4.0	7.0
90	<= TMS-TA <	100	3.5	6.5

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

### b. Analisis Kinerja Operasional, menggunakan Kep-100/MBU/2002

#### 1. Indikator Penilaian

Indikator yang dinilai meliputi unsure kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

#### 2. Nilai/Bobot

BUMN Infrastruktur : 15

BUMN Non-Infrastruktur : 15

### 3. Sifat dan Kategori Penilaian

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

**Tabel 2.10**

#### **Kategori Penilaian Kinerja Operasional**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>
Baik sekali	100 % X Bobot indikator yang bersangkutan
Baik	80 % X Bobot indikator yang bersangkutan
Cukup	50 % X Bobot indikator yang bersangkutan
Kurang	20 % X Bobot indikator yang bersangkutan

*Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002*

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah ;

**Tabel 2.11**

#### **Definisi Kategori Penilaian Indikator Operasional**

<b>BAIK SEKALI</b>	Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dsb) dan kuantitas (produktivitas, rendemen, dsb)
<b>BAIK</b>	Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar Normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari kuantitas maupun kualitas
<b>CUKUP</b>	Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas maupun kuantitas
<b>KURANG</b>	Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal

*Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002*

#### 4. Mekanisme Penilaian

Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS, komisaris/Dewan pengawasan wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada pemegang saham. Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawasan wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya. Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS sekaligus menetapkan indikator aspek operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawasan.

#### d. Analisis Administrasi menggunakan Kep-100/MBU/2002

##### 1. Nilai/Bobot

BUMN Infrastruktur : 15

BUMN Non-infrastruktur : 15

## 2. Indikator Penilaian

**TABEL 2.12**  
**Bobot Indikator Penilaian Kinerja Administrasi**

Indikator	BOBOT	
	Infra	Non-Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
<b>Total Bobot</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

## 3. Metode Penilaian

### Laporan Perhitungan Tahunan

Standar waktu penyampaian perhitungan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh pemegang saham paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

**TABEL 2.13**  
**Standar Waktu Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan**

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Nilai
1. Sampai dengan akhir tahun bulan keempat sejak tahun buku Perhitungan tahunan ditutup	3
2. Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku Perhitungan tahunan ditutup	2
3. Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

## Rancangan RKAP

Standar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

**TABEL 2.14**  
**Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Rancangan RKAP**

Jangka Waktu Surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Nilai
1. Dua bulan atau lebih cepat	3
2. Kurang dari dua bulan	0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

## Laporan Periodik

Laporan periodik triwulan harus di terima oleh Komisaris/Dewan Pengawasan dan pemegang saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

**TABEL 2.15**  
**Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Periodik**

Jangka Keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
1. Lebih kecil atau sama dengan 10 hari	3
2. $0 < X \leq 30$ hari	2
3. $0 < X < 60$ hari	1
4. $> 60$ hari	0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

## Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Indikator yang dinilai :

**TABEL 2.16**  
**Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Periodik**

Indikator	Nilai/Bobot	
	Infra	Non-Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	3	3
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

Rumus Efektivitas Penyaluran dana:

$$\text{Efektivitas Penyaluran Dana} = \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Jumlah dana yang tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari saldo awal, pengembalian pinjaman, setoran eks pembagian laba yang di terima dalam tahun yang bersangkutan, dan pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman termasuk dana penjaminan.

## Daftar Penilaian Tingkat Penyerapan PUKK

**TABEL 2.17**

### Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Periodik

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d 90	80 s.d 85	< 80
Skor	3	3	1	0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

Rumus Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman :

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang di salurkan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antar bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah : lancar 100 %, kurang lancar 75 %, ragu-ragu 25%, macet 0%.
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

**TABEL 2.18**

### Daftar Penilaian Tingkat Pengembalian Dana PUKK

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d 70	10 s.d 40	< 10
Skor	3	3	1	0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

**e. Klarifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN**

**1. SEHAT**

AAA apabila Total Skor (TS) lebih besar dari 95

AA apabila  $80 < TS \leq 95$

A apabila  $65 < TS \leq 80$

**2. KURANG SEHAT**

BBB apabila  $50 < TS \leq 65$

BB apabila  $40 < TS \leq 50$

B apabila  $30 < TS \leq 40$

**3. TIDAK SEHAT**

CCC apabila  $20 < TS \leq 30$

CC apabila  $10 < TS \leq 20$

C apabila  $TS \leq 10$

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Daerah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) yang terletak di Jl. Galangan kapal no. 31 Makassar.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a.. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur akuntansi dan mempelajari teori-teori atau kepustakaan lainnya guna penyusunan landasan teori serta standar-standar penilaian kinerja dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan manajemen dan melalui laporan berkala yang selama ini dihasilkan oleh perusahaan untuk memperoleh data baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, adalah :

- a. Data kualitatif, merupakan data yang berhubungan dengan data non angka bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi dan gambaran umum perusahaan.
- b. Data kuantitatif, merupakan data yang berhubungan dengan angka-angka, seperti laporan keuangan.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke perusahaan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan jawaban tertulis dari daftar pertanyaan yang diajukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi dan yang tidak dipublikasikan perusahaan.

### 3.4 Metode Analisis

Untuk membahas masalah yang dikemukakan di atas, maka akan digunakan metode analisis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Kep-100/MBU/2002. Analisis yang digunakan dalam surat keputusan tersebut terdiri atas :

#### 1. Analisis Kinerja Keuangan meneurut Kep-100/MBU/2002

##### a. Nilai/Bobot

BUMN Infrastruktur : 50

BUMN Non-Infrastruktur : 70

b. Indikator Penilaian

**Tabel 3.1**  
**Bobot Indikator Kinerja Keuangan**

Indikator	BOBOT	
	Infra	Non Infra
1. Return On Equity (ROE)	15	20
2. Return On Investment (ROI)	10	15
3. Cash Ratio (CR)	3	5
4. Current Ratio (CuR)	4	5
5. Collection Periods (CP)	4	5
6. Inventory Turnover (ITO)	4	5
7. Total Asset Turnover (TATO)	4	5
8. Total Modal Sendiri thd Total Aset (TMS-TA)	6	10
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

Dalam analisis ini, laporan keuangan harus terlebih dahulu diperiksa oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pendapatan **Wajar Tanpa Pengecualian** atau **Wajar Dengan Pengecualian**.

2. *Analisis Kinerja Operasional*, menggunakan Kep-100/MBU/2002 dengan nilai maksimal 15.

a. Indikator Penilaian. Indikator yang dinilai meliputi unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

- b. Sifat dan Kategori Penilaian. Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Skor dan Kategori Penilaian Indikator Kinerja Operasional**

Kategori	Skor
Baik sekali	100 % X Bobot indikator yang bersangkutan
Baik	80 % X Bobot indikator yang bersangkutan
Cukup	50 % X Bobot indikator yang bersangkutan
Kurang	20 % X Bobot indikator yang bersangkutan

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah :

**Tabel 3.3**

**Definisi Kategori Penilaian Indikator Operasional**

<b>BAIK SEKALI</b>	Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dsb) dan kuantitas (produktivitas, rendemen, dsb)
<b>BAIK</b>	Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar Normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari kuantitas maupun kualitas
<b>CUKUP</b>	Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas maupun kuantitas
<b>KURANG</b>	Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

- c. Mekanisme Penilaian

Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pengesahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran Perusahaan. Sebelum Pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS, Komisaris/Dewan Pengawasan wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada pemegang saham. Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris /Dewan Pengawasan wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya. Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS sekaligus menetapkan indikator aspek operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas.

4. *Analisis Administrasi* dengan nilai maksimal 15

Komponen dalam analisis ini meliputi

a. **Laporan Perhitungan Tahunan**, dengan nilai maksimal 3.

Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh pemegang saham paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

**TABEL 3.4**  
**Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Audit**

<b>Jangka Waktu Laporan Audit Diterima</b>	<b>Nilai</b>
1. Sampai dengan akhir tahun bulan keempat sejak tahun buku Perhitungan tahunan ditutup	3
2. Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku Perhitungan tahunan ditutup	2
3. Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

*Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002*

- b. **Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)**, dengan nilai maksimal 3.

Standar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

**TABEL 3.5**  
**Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Rancangan RKAP**

<b>Jangka Waktu Surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan</b>	<b>Nilai</b>
1. Dua bulan atau lebih cepat	3
2. Kurang dari dua bulan	0

*Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002*

**c. Laporan Periodik, dengan nilai maksimal 3.**

Standar waktu penyampaian laporan periodik triwulan harus diterima oleh Komisaris/ Dewan Pengawasan dan pemegang saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

**TABEL 3.5**  
**Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Periodik**

Jangka Keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
1. Lebih kecil atau sama dengan 10 hari	3
2. $0 < X \leq 30$ hari	2
3. $0 < X < 60$ hari	1
4. $> 60$ hari	0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

**d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, dengan nilai maksimal 6.**

Indikator yang dinilai dalam komponen ini adalah :

1. Efektivitas penyaluran dana PUKK dengan bobot 3

$$\text{Efektivitas Penyaluran Dana} = \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100 \%$$

Adapun Penilaiannya adalah :

**TABEL 3.6**  
**Daftar Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Periodik**

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d 90	80 s.d 85	< 80
Skor	3	3	1	0

Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002

2. Tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman dengan bobot 3

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang di salurkan}} \times 100\%$$

Adapun Penilaiannya adalah :

**TABEL 3.7**  
**Daftar Penilaian Tingkat Pengembalian Dana PUKK**

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d 70	10 s.d 40	< 10
Skor	3	3	1	0

*Sumber : SK Meneg BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002*

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan**

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) merupakan jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non infrastruktur yang berlokasi di pantai paotere kecamatan Tallo, bagian utara kotamadya Makassar.

Sejarah berdirinya PT. Industri Kapal Indonesia berawal dari tahun 1962. Saat itu, di Makassar telah dibangun dua proyek galangan kapal, yaitu proyek galangan kapal paotere yang dibangun oleh Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan yang dikhususkan untuk memproduksi kapal-kapal baja dengan bobot sampai 500 ton. Proyek ini juga memiliki fasilitas untuk menaikkan kapal ke darat dan menurunkan kembali kapal-kapal tersebut ke laut yang mempunyai daya angkut 500 LT 9 (*lifting ton*) dengan panjang lintasan 45 meter. Sedangkan proyek Galangan Kapal Tallo yang dibangun oleh Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi dimaksudkan untuk memproduksi kapal-kapal kayu dengan bobot sampai dengan 300 ton.

Pada pertengahan tahun 1963, kegiatan kedua proyek tersebut sampai pada taraf pekerjaan-pekerjaan dasar. Tetapi, proyek Galangan Kapal Paotere tidak didukung peralatan yang memadai. Sedangkan proyek Galangan Kapal Tallo memiliki peralatan canggih yang didatangkan dari Polandia.

Karena adanya keterbatasan biaya pada waktu itu, maka pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden No.335/1963, memutuskan untuk memusatkan pengembangan kedua proyek tersebut dengan menempati areal tanah seluas 250.000 m<sup>2</sup> dengan mengambil lokasi di wilayah utara Makassar, tepatnya berada di Pantai Paotere Kecamatan Tallo dibawah pimpinan Departemen Industri dan Pertambangan serta mengubah namanya menjadi Proyek Galangan Kapal Makassar dan dengan Surat Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1963, maka proyek ini dinyatakan sebagai proyek vital. Dengan terjadinya penggabungan tersebut, maka :

1. Lokasi Proyek Galangan Kapal Tallo dipindahkan dan dibangun bersebelahan dengan Proyek Galangan Kapal Paotere.
2. Proyek Galangan Kapal Paotere mengadakan *redesigning* yang disesuaikan dengan dana yang tersedia serta tetap mengacu pada sasaran utamanya yaitu memproduksi dan mereparasi kapal-kapal dengan bobot 500 ton.
3. Menunda pembangunan Proyek Galangan Kapal Paotere untuk diselesaikan pada tahap kedua yaitu rencana perluasan.

Akhirnya setelah mengalami masa pembangunan selama kira-kira 7 tahun, maka pada tanggal 30 maret 1970, penyelesaian dan pemakaian Galangan Kapal

Makassar tahap pertama diresmikan oleh Sekretaris Jendral Perindustrian mewakili Menteri Perindustrian.

Galangan Kapal Makassar mempunyai *slipway horizontal* dan *slipway* miring dengan *shifter* besar untuk menaikkan kapal dari air, dan setelah kapal dinaikkan maka kapal ditarik kesamping ke salah satu *site track* (*Norman System*). Panjang *shifter* adalah 45 meter dan memiliki daya angkut 500 ton dengan ketinggian air diatas *shifter* maksimal 3,40 meter. Dibagian sebelah barat dari *slipway horizontal* terdapat 3 *site track* yang panjangnya 70 meter dan berkapasitas 500 TLC ( Total Lift Capacity), sedangkan sebelah timur terdapat *site track* yang panjangnya 50 meter dengan kapasitas 300 DWT.

Sejak tahun 1970 sampai oktober 1977, Galangan Kapal Makassar mempunyai status sebagai proyek. Pada tanggal 29 Oktober 1977, dengan akte Notaris Sistke Limoa, SH No. 122 dan merupakan pelaksanaan dari PP No. 17 Tahun 1977 (lembaran Negara RI No. 122), Galangan Kapal Makassar berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT.Industeri Kapal Indonesia (Persero) dengan unit-unit produksi saat itu adalah :

1. Unit Dok dan Galangan Kapal di Teluk bayur
2. Unit Dok dan Galangan Kapal Gresik di Gresik
3. Unit Dok dan Galangan Kapal Makassar di Makassar
4. Unit Dok dan Galangan Kapal Bitung di Bitung

Namun, beberapa tahun kemudian perubahan struktur manajemen membawa pengaruh terhadap unit produksi, sehingga unit produksi yang dimiliki sampai tahun 1994 yaitu :

1. Dok dan Galangan Kapal Makassar di Makassar
2. Dok dan Galangan Kapal Bitung di Bitung

Sedangkan unit usaha terdiri atas :

1. Unit usaha Jakarta
2. Unit usaha ambon

Dengan semakin pesatnya permintaan produksi dan reparasi kapal di Unit Dok dan Galangan Kapal Makassar, maka Makassar telah ditetapkan sebagai pusat industri perkapal untuk wilayah Indonesia timur. Sebagai langkah untuk menuju ke arah pusat industri perkapalan ini, maka telah direncanakan dalam waktu dekat akan memperluas PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar agar mampu membuat dan mereparasi kapal dengan bobot samapai dengan 10.000 DWT.

Sejak didirikan tahun 1962 sampai sekarang, PT. Industri Kapal Industri dalam kegiatannya mengalami pasang surut, dimana pukulan terberat dialami tahun 1985 sebagai dampak dari kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan dalam sharing kapal yang telah berumur 25 tahun ke atas.

Kemajuan dialami pada akhir tahun 1991 setelah adanya pergantian direksi. Kemajuan ini ditandai oleh peningkatan jumlah penjualan serta pulihnya kepercayaan pihak supplier, perbankan, dan pemilik kapal terhadap kapabilitas PT. Industri Kapal

Indonesia (Persero) yang juga diberikan kepercayaan penuh membangun seluruh kapal ikan bantuan Spanyol sebanyak 31 buah dengan biaya lebih dari 540 milyar rupiah.

#### **4.2 Visi dan Misi Perusahaan**

Dalam upaya peningkatan peran perusahaan dalam membangun ekonomi nasional. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah disepakati visi perusahaan sebagai berikut : **Menjadi Industri Perkapalan yang sehat, maju dan berdaya saing di Kawasan Timur Indonesia.**

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara mengembangkan misi :

**Menyelenggarakan usaha pembuatan kapal, reparasi kapal, alat apung sejenisnya dan produk jasa lain dalam rangka diversifikasi usaha, dengan menerapkan kemajuan iptek secara tepat guna sehingga dapat mendukung pembangunan angkutan laut nasional maupun internasional.**

**Menerapkan tatakelola usaha yang baik dan mengembangkan kerja sama usaha. Peningkatan nilai perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah industri dan memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan karyawan PT. Industri kapal Indonesia (Persero).**

### 4.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menerapkan bentuk dari prinsip organisasi fungsional yang menekankan pada pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara tegas dan jelas, dengan garis perintah dan tanggung jawab yang berjalan lurus dari pimpinan ke bawahannya.

Pada bulan Agustus 2002, diadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap struktur organisasi perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan yang baru tersebut (SK No. 044/DIR-INDUSTRI KAPAL INDUSTRI /KPTS/VIII/2002), kegiatan produksi dibagi menjadi tiga unit, masing-masing unit dok dan galangan kapal Makassar, unit dok dan galangan kapal bitung, serta unit usaha dan perdagangan sebagai profit center (SBU) yang masing-masing unit dipimpin oleh seseorang kepala unit setingkat kapala biro di kantor pusat. Masing-masing unit diberi wewenang dengan pembatasan tertentu untuk melakukan kegiatannya secara penuh guna target yang ditetapkan dalam RKAP.

Adapun struktur organisasi PT. IKI (Persero), dapat dilihat pada gambar pada halaman 45.

Tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan adalah sebagai berikut :

#### 1. Direktur Utama

Bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris atau RUPS serta bersama-sama para direktur menetapkan manajemen dan kebijaksanaan pokok perusahaan dalam rangka panjang maupun jangka pendek

2. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepala SPI bertugas melaksanakan fungsi pengawasan baik di bidang administrasi, keuangan, investasi, pemasaran, SDM maupun produksi serta memberikan saran dan perbaikan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

3. Staf Ahli/Asisten Direksi

Bertanggung jawab kepada direksi. Tugas pokoknya adalah memberikan saran kepada direksi, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.

4. Direktur Produksi

Bersama-sama Direksi lainnya menetapkan kebijaksanaan pokok perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek serta memimpin, mengelola, mengembangkan usaha perusahaan dan memonitor serta mengendalikan operasional perusahaan di bidang perencanaan, pengembangan mutu dan produksi serta upaya merealisasikan apa yang telah ditetapkan dalam master plan/program kerja manajemen. .

5. Direktur Keuangan/komersial

Bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris melalui RUPS dan bersama-sama dengan Direksi lainnya menetapkan kebijaksanaan pokok perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta bertanggung jawab atas pengendalian, dan pengawasan bidang keuangan/akuntansi, bidang

umum, dengan bidang komersial teknologi agar pelaksanaannya secara ekonomis dan efektif sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dalam RUPS.

6. Direktur Pemasaran

Bertanggung jawab kepada Dewan komisaris melalui RUPS dan bersama-sama dengan Direktur menetapkan kebijaksanaan pokok perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, serta merencanakan dan mengkoordinir fungsi-fungsi di gudang pengadaan dan penjualan, promosi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan perusahaan.

7. Sekretaris Perusahaan

Bertanggung jawab kepada Direksi dan tugas pokoknya adalah mengatur/mengkoordinir tugas-tugas kesekretariatan humas, hukum, dan umum serta sumber daya manusia.



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung metode pengukuran kinerja yang diinginkan. Di Indonesia pengukuran kinerja terhadap PT. (Persero) Industri Kapal Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002. Pada SK Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002, indikator aspek operasional ditentukan sendiri oleh perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Indikator tersebut berasal dari usulan dan penilaian dari Komisaris/Dewan Pengawasan perusahaan.

Karena adanya kendala keterbatasan perolehan data perusahaan menyangkut usulan dan pertimbangan Komisaris/Dewan Pengawasan perusahaan mengenai indikator aspek kinerja, maka penulis menggunakan SK Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 sebagai metode analisis utama. Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 meliputi 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu aspek kinerja keuangan, aspek operasional, dan aspek kinerja administrasi, penerapan kinerja aspek tersebut akan dibahas berikut ini :

## 5.1 Aspek Kinerja Keuangan

Dalam penerapan kinerja keuangan ini digunakan 8 jenis rasio, yaitu *Return On Equity*, *Return On Investment*, *Cash Ratio*, *Current*, *Collection Period*, *Inventory Turnover*, *Total Assets Turnover*, dan *Net Working Capital to Total Asset*.

### 1. Return On Equity (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal yang dimiliki perusahaan. ROE merupakan salah satu analisis rasio yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, karena rasio ini mampu menggambarkan kepentingan pemegang saham.

Tabel 5.1  
Perhitungan Perkembangan ROE  
Periode 2004-2008

Tahun	Laba Setelah Pajak (Rp) (1)	Modal Sendiri (Rp) (2)	ROE (Rp) (3) = (1) : (2) x 100	SKOR
2004	2.019.408.128,38	3.521.000.000,00	57,35 %	20
2005	102.268.302,00	3.521.000.000,00	2,90 %	5,5
2006	(9.191.501.716,00)	3.521.000.000,00	(282,72) %	0
2007	(550.088.721,00)	3.521.000.000,00	(15,62) %	0
2008	(3.147.147.844,00)	56.694.000.000,00	( 5,55 ) %	0

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

Dari tabel di atas menunjukkan perhitungan laba bersih PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) pada tahun 2004-2008. Berdasarkan perhitungan tersebut

dapat dilihat penurunan tingkat persentase laba sangat menurun dari tahun 2005 sampai 2008 karena laba bersih setelah pajak semakin menurun sehingga kemampuan kinerja perusahaan tidak dapat mengembalikan modal, menyebabkan skor mengalami penurunan.

## 2. Return On Investment (ROI)

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemakaian sumber daya oleh perusahaan. Berdasarkan data keuangan, maka ROI PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Perhitungan Perkembangan ROI  
Periode 2004-2008

Tahun	EBIT+Penyusutan (Rp) (1)	Capital Employed (Rp) (2)	ROI (Rp) (3) = (1): (2)x100%	SKOR
2004	6.398.329.879,06	13.240.121.879,67	51,48 %	15
2005	3.806.643.827,00	120.143.653.893,00	3,77 %	3,77
2006	(5.487.126.191,00)	340.341.747.290,00	(1,43) %	0
2007	2.654.729.401,00	67.565.118.149,00	3,92%	3
2008	(189.014.381,00)	73.416.435.875,00	1,3 %	3

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

Dari tabel di atas perhitungan dari tahun 2004-2008, berdasarkan perhitungan 2004 ROI mencapai nilai maksimal. Di tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan drastis, tahun 2007 mengalami kenaikan mencapai 3,92% tetapi untuk tahun 2008 menurun 1,3 %, karena perbandingan antara EBIT dengan

capital employed mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga skor mengalami fluktuasi.

### 3. Cash Ratio (CR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan kas/setara kas untuk membayar kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Berdasarkan data keuangan, maka cash ratio PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3  
Perhitungan Perkembangan CR  
Periode 2004-2008

Tahun	Kas + Bank + Surat berharga jgk pendek (Rp) (1)	Current liabilities (Rp) (2)	Cash Ratio (Rp) (3) = (1): (2)x100%	SKOR
2004	4.532.646.113,02	130.486.097.483,82	3,47 %	0
2005	4.097.768.404,00	30.960.345.961,00	13,23 %	2
2006	(550.218.220,00)	51.085.470.297,00	1,07 %	0
2007	1.356.259.294,00	59.152.258.493,00	2,29 %	0
2008	1.633.569.069,00	66.417.433.496,00	2,46 %	0

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

Dari table di atas menunjukkan perhitungan cash ratio tahun 2004 mencapai persentase 3,47%, pada tahun 2005 itu mengalami kenaikan sebesar 9,76% tetapi tahun 2006-2008 mengalami penurunan yang drastis disebabkan penurunan aktiva lancar dengan hutang lancar sehingga skor mengalami penurunan.

#### 4. Current Ratio (CuR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Berdasarkan data keuangan, maka current ratio PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4  
Perhitungan Perkembangan CuR  
Periode 2004-2008

Tahun	Current Assets (Rp) (1)	Current Liabilities (Rp) (2)	Current ratio (Rp) (3) = (1): (2)x100%	SKOR
2004	77.306.430.940,96	130.486.097.483,82	59,24 %	0
2005	82.080.225.786,00	30.960.345.961,00	265,11%	5
2006	70.568.285.976,00	51.085.470.297,00	138,13 %	5
2007	67.565.118.154,00	59.152.258.493,00	114,23 %	4
2008	73.416.435.867,00.	66.417.433.496,00	110,54 %	4

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

Dari perhitungan di atas pada tahun 2004 mendapatkan skor 0, tetapi di tahun 2005-2006 ini mengalami peningkatan rasio lancar yang tinggi, dan tahun 2007-2008 mengalami penurunan satu tingkat dari nilai maksimal sehingga pada tahun 2008 tidak mencapai nilai maksimal sesuai SK Meneg BUMN.

## 5. Collection Period (CP)

Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menagih suatu tagihan. Berdasarkan data keuangan, maka collection period PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5  
Perhitungan Perkembangan Collection periods  
Periode 2003-2008

Tahun	Total piutang usaha (Rp) (1)	Pendapatan usaha (Rp) (2)	Collection periods (Rp) (3) = (1): (2)x365	SKOR
2004	30.934.518.597,16	77.430.570.810,00	145 hari	3.5
2005	27.399.192.159,00	62.004.709.785,00	161 hari	3
2006	26.758.451.073,00	29480.080.362,00	331 hari	0
2007	23.000.979.939,00	36.501.825.323,00	229 hari	1.8
2008	27.293.224.092,00	36.654.763.932,00	271 hari	0,6

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

- Pada tahun 2004 memiliki collection periods 145 hari dan tahun 2003 sebesar 130 hari, maka skor tahun 2004 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat collection periods, skor yang diperoleh : 3.5
  - Perbaikan collection periods (15 hari) skor yang diperoleh : 3
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3.5
- Pada tahun 2005 memiliki collection periods 161 hari dan tahun 2004 sebesar 145 hari, maka skor tahun 2005 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat collection periods, skor yang diperoleh : 3
  - Perbaikan collection periods (16 hari) skor yang diperoleh : 3
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

- Pada tahun 2006 memiliki collection periods 331 hari dan tahun 2005 sebesar 161 hari, maka skor tahun 2006 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat collection periods, skor yang diperoleh : 0
  - Perbaikan collection periods (170 hari) skor yang diperoleh : 5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5
- Pada tahun 2007 memiliki collection periods 229 hari dan tahun 2006 sebesar 331 hari, maka skor tahun 2007 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat collection periods, skor yang diperoleh : 1,8
  - Perbaikan collection periods (102 hari) skor yang diperoleh : 5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5
- Pada tahun 2008 memiliki collection periods 271 hari dan tahun 2007 sebesar 229 hari, maka skor 2008 menurut SK Meneg BUMN:
  - Tingkat collection periods, skor yang diperoleh : 0,6
  - Perbaikan collection periods (42 hari) skor yang diperoleh : 5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5

Dari perhitungan di atas pada tahun 2004-2006 tingkat pengumpulan piutang tidak mengalami perubahan sedangkan 2007-2008 mengalami penurunan collection periods berarti waktu yang diperlukan lama untuk mengumpulkan piutang.

## 6. Inventory Turnover (ITO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola material untuk menghasilkan barang atau jasa. Berdasarkan data keuangan, maka inventory turnover PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Perhitungan Perkembangan Inventory Turnover**  
**Periode 2004-2008**

Tahun	Total persediaan (Rp) (1)	Pendapatan usaha (Rp) (2)	Inventory turnover (Rp) (3) = (1): (2)x365	SKOR
2004	7.487.634.440,20	77.430.570.810,00	35 hari	5
2005	4.916.857.996,00	62.004.709.785,00	28 hari	5
2006	5.495.138.110,00	29480.080.362,00	68 hari	4,5
2007	5.277.881.499,00	36.501.825.323,00	52 hari	5
2008	4.857.970.028,00	36.654.763.932,00	48 hari	5

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

- Pada tahun 2004 memiliki ITO 35 hari dan tahun 2003 sebesar 15 hari, maka skor tahun 2004 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat *inventory turn over*, skor yang diperoleh : 5
  - Perbaikan *inventory turn over* (20 hari) skor yang diperoleh : 3,5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5
- Pada tahun 2005 memiliki inventory turnover 28 hari dan tahun 2004 sebesar 35 hari, maka skor tahun 2005 menurut SK Meneg BUMN:
  - Tingkat *inventory turn over*, skor yang diperoleh : 5
  - Perbaikan *inventory turn over* (7 hari) skor yang diperoleh : 1,8
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5
- Pada tahun 2006 memiliki inventory turnover 68 hari dan tahun 2005 sebesar 28 hari, maka skor tahun 2006 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat *inventory turn over*, skor yang diperoleh : 4,5
  - Perbaikan *inventory turn over* (40 hari) skor yang diperoleh : 5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5

- Pada tahun 2007 memiliki *inventory turnover* 52 hari dan tahun 2006 sebesar 68 hari, maka skor tahun 2007 menurut SK Meneg BUMN :

- Tingkat *inventory turn over*, skor yang diperoleh : 5

- Perbaikan *inventory Turn Over* (16 hari) skor yang diperoleh : 3

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5

- Pada tahun 2008 memiliki *inventory turnover* 68 hari dan tahun 2007 sebesar 52 hari, maka skor 2008 menurut SK Meneg BUMN:

- Tingkat *inventory turn over*, skor yang diperoleh : 5

- Perbaikan *inventory turn over* (4 hari) skor yang diperoleh : 1,2

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5

Dari perhitungan di atas pada tahun 2004-2008 tingkat perputaran persediaan itu selalu mencapai nilai maksimal tetapi tahun 2006 menurun hanya 0,5.

#### 7. Total Asset Turn Over (TATO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi relative dari total aktiva untuk meningkatkan pendapatan/ penjualan. Berdasarkan data keuangan, maka Total *Asset Turn Over* PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7  
Perhitungan Perkembangan Total Asset Turn Over  
Periode 2004-2008

Tahun	Total pendapatan (Rp) (1)	Capital employed (Rp) (2)	TATO (Rp) (3) = (1): (2)x100%	SKOR
2004	81.760.728.992,40	13.240.121.879,67	617,52 %	5
2005	62.882.319.455,00	120.193.653.894,00	52,31%	2,5
2006	34.667.358.542,00	122.898.609.746,00	28,20%	2
2007	36.936.754.732,00	178.191.038.924,00	20,72%	2
2008	36.679.398.538,00	73.416.535.866,00	49,96%	1,5

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

- Pada tahun 2004 memiliki TATO 617,52% dan tahun 2003 sebesar 117,5%, maka skor tahun 2004 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat perputaran total asset, skor yang diperoleh : 5
  - Perbaikan TATO (110,65%) skor yang diperoleh : 5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5
  
- Pada tahun 2005 memiliki TATO 52,31% dan tahun 2004 sebesar 6,85%, maka skor tahun 2005 menurut SK Meneg BUMN:
  - Tingkat perputaran total asset, skor yang diperoleh : 2,5
  - Perbaikan TATO (45,46%) skor yang diperoleh : 5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5
  
- Pada tahun 2006 memiliki TATO 28,20% dan tahun 2005 sebesar 52,31%, maka skor tahun 2006 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat perputaran total asset, skor yang diperoleh : 2
  - Perbaikan TATO (30,11%) skor yang diperoleh : 5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 5

- Pada tahun 2007 memiliki TATO 20,72% dan tahun 2006 sebesar 28,20%, maka skor tahun 2007 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat perputaran total asset, skor yang diperoleh : 2
  - Perbaikan TATO (7,48%) skor yang diperoleh : 3,5
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5
  
- Pada tahun 2008 memiliki TATO 49,96% dan tahun 2007 sebesar 20,72%, maka skor 2008 menurut SK Meneg BUMN :
  - Tingkat perputaran total asset, skor yang diperoleh : 1,5
  - Perbaikan TATO (29,24%) skor yang diperoleh : 3
  - Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Dari perhitungan di atas pada tahun 2004-2008 sangat bervariasi nilai yang diperoleh sehingga di tahun 2008 perputaran jumlah asset tidak mencapai nilai maksimal yang disyaratkan sesuai SK Meneg BUMN.

#### **8. Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS-TA)**

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi modal sendiri terhadap total aset pada akhir periode. Berdasarkan data keuangan, maka Total Modal Sendiri terhadap total aset PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8  
Perhitungan Perkembangan TMS-TA  
Periode 2004-2008

Tahun	Modal sendiri (Rp) (1)	Total asset (Rp) (2)	TMS thdp TA (Rp) (3) = (1): (2)x100%	SKOR
2004	9.858.903.181,24	212.656.842.012,71	4,63 %	4
2005	9.961.171.483,00	231.328.685.178,00	4,30%	4
2006	769.669.767,00	231.620.178.518,00	3,32 %	4
2007	219.581.046,00	245.756.157.078,00	0,08 %	4
2008	(2.927.566.798,00)	282.602.603.442,00	(11,03) %	0

Sumber : Laporan keuangan dan data diolah penulis

Dari perhitungan di atas dari tahun 2004-2007 nilai persentase tidak mengalami perubahan dan tidak ada peningkatan tetapi 2008 sangat menurun sekali hingga persentase untuk tahun terakhir dapat (11,03) % sehingga skor dicapai 0. Pada tahun 2003-2008 tidak ada yang mencapai nilai maksimal.

Berdasarkan hasil analisis atas kinerja keuangan maka secara keseluruhan nilai/bobot yang diperoleh PT. (Persero ) Industri Kapal Indonesia. perinciannya sebagai berikut :

**Tabel 5.9**  
**PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)**  
**Perkembangan Kinerja Keuangan**  
**2004-2008**

NO.	KRITERIA PENILAIAN	NILAI OPTIMAL	SKOR ASPEK KEUANGAN PERUSAHAAN				
			2004	2005	2006	2007	2008
1.	ROE	20	20	5,5	0	0	0
2.	ROI	15	15	3,77	0	3	3
3.	CR	5	0	2	0	0	0
4.	CuR	5	0	5	5	4	4
5.	CP	5	3,5	3	0	1,8	0,6
6.	ITO	5	5	5	4,5	5	5
7.	TATO	5	1,5	2,5	2	2	1,5
8.	TMS-TA	10	4	4	4	4	0
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>50</b>	<b>30,77</b>	<b>15,2</b>	<b>19,8</b>	<b>14,1</b>

Sumber: Laporan keuangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, data diolah

## 5.2 Analisis Kinerja Operasional

Untuk aspek ini, indikator operasional yang digunakan beserta penilaiannya telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan usulan dan pertimbangan dari komisaris atau Dewan Pengawas Perusahaan. Besarnya skor penilaian dalam SK Meneg BUMN ini adalah 15 untuk BUMN Non-Infrastruktur. Berdasarkan perolehan data dari perusahaan, ada (6) enam macam indikator yang ditentukan oleh perusahaan. Perincian kinerja operasional setiap elemen penilaian sebagai berikut :

**Tabel 5.10**  
**PT. Industri Kapal Indonesia**  
**Perkembangan Kinerja Operasional 2004-2008**

Indikator Aspek Operasional	BOBOT	SKOR ASPEK OPERASIONAL				
		2004	2005	2006	2007	2008
1. Produktifitas tenaga kerja	3	3	3	1	3	3
2. Produktivitas konstruksi baja	3	3	3	3	2	2
3. Delivery Day	1	1	1	1	1	1
4. Produktivitas tenaga kerja - Pekerjaan reparasi - pekerjaan bangunan baru	2	2	2	2	2	2
5. Pendapatan rata-rata perkapalan	3	3	3	2	2	2
6. Aspek dinamis	3	3	3	3	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)

Untuk aspek operasional mengalami fluktuasi skor, untuk 2006 merupakan skor terendah sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan disebabkan produktifitas tenaga kerja dan pendapatan rata-rata perkapalan kemudian kapasitas reparasi kapal sangat terbatas, fasilitas sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai untuk digunakan dan sumber daya manusia yang dimiliki kualitasnya belum memadai.

### 5.3 Analisis Kinerja Administrasi

Dalam analisis kinerja administrasi, ada 4 indikator penilaian yang digunakan yaitu Laporan Perhitungan Tahunan, Rancangan RKAP, Laporan Periodik dan kinerja BUMN dan kinerja PUKK.

## 1. Laporan Perhitungan Tahunan

Kriteria penilaian menurut SK Menteri Negara BUMN, standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus sudah diterima oleh pemegang saham paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perusahaan, laporan hasil pemeriksaan BPKP/ kantor akuntan yang terbit Mei tahun berikutnya akan disampaikan sendiri kepada pemegang saham oleh direksi pada bulan tersebut. Sesuai dengan SK menteri, maka skor yang diperoleh adalah 2, karena laporan tersebut disampaikan tidak tepat waktu, yaitu disampaikan pada bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

## 2. Rancangan RKAP

Kriteria menurut SK menteri Negara BUMN, rancangan RKAP harus sudah terima oleh para pemegang saham paling lambat 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perusahaan, untuk tahun 2004-2008, RKAP dilaksanakan pada tanggal 4 Januari . Sedangkan rancangan RKAP tersebut disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 30 Oktober 2002. Sesuai dengan SK Menteri, maka skor yang diperoleh adalah 3. Hal ini berarti bahwa perusahaan mampu mencapai bobot maksimal yang dipersyaratkan.

### 3. Laporan Periodik

Kriteria menurut SK Meneg BUMN, laporan periodik triwulan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawasan dan Pemegang Saham paling lambat setelah berakhirnya periode laporan.

**Tabel 5.11**  
**Laporan periodik triwulan**

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal Diterima
I	31/03/08	05/04/08
II	30/06/08	07/07/08
III	30/09/08	05/10/08
IV	31/12/08	10/01/09

*Sumber: PT.IKI (Persero)*

Berdasarkan table diatas, penyampaian laporan priodik perusahaan tidak pernah mengalami keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak berakhirnya periode laporan atau jumlah hari keterlambatan adalah 0 (nol) hari. Menurut SK Meneg BUMN, jika jumlah hari keterlambatan lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), maka skor yang diperoleh adalah 3 (tiga). Hal ini berarti bahwa perusahaan mampu mencapai bobot maksimal yang dipersyaratkan.

### 4. Kinerja PUKK/ CSR

Berdasarkan hasil wawancara, hasil data yang diperoleh penulis dari pihak perusahaan dengan melihat hasil laporan hasil audit maka program

Kinerja PUKK tahun 2004-2005 masih ada anggaran yang di keluarkan perusahaan untuk program bina lingkungan ini tetapi semenjak tahun 2006 sampai 2008 perusahaan tidak mampu mengeluarkan anggaran lagi disebabkan perusahaan mengalami krisis akibat utang jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis atas kinerja administrasi maka secara keseluruhan nilai/bobot yang diperoleh PT. IKI (Persero) dari tahun 2004-2008. Perincian kinerja administrasi setiap elemen penilaian adalah :

**Tabel 5.12**  
**PT. Industri Kapal Indonesia**  
**Perkembangan Kinerja Administrasi 2004-2008**

Indikator Aspek Administrasi	Nilai Optimal	SKOR ASPEK ADMINISTRASI				
		2004	2005	2006	2007	2008
1. Laporan perhitungan tahunan	3	3	3	3	2	2
2. Rancangan RKAP	3	3	3	3	3	3
3. Laporan periodik	3	3	3	3	3	3
4 Kinerja PUKK/CSR						
- Efektivitas penyaluran	3	3	3	0	0	0
- tingkat kolektibilitas	3	3	3	0	0	0
Pengembalian pinjaman						
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT.IKI (Persero)

Pada aspek administrasi mengalami penurunan pada tahun 2006,2007, dan 2008, karena perusahaan tidak memiliki ketersediaan dana yang disebabkan tingkat

kelektibilitas pengembalian pinjaman sehingga tidak ada dana yang bisa disalurkan untuk menjalankan program PUKK atau CSR.

Dari penilaian keseluruhan aspek dari tahun 2004-2008; aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) pengukuran sesuai dengan SK Meneg BUMN, tingkat kesehatan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Berikut disajikan rangkuman hasil penilaian kinerja perusahaan secara keseluruhan.

**Tabel 5.21**  
**PT. Industri Kapal Indonesia**  
**Perkembangan Kinerja untuk SK Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002**  
**2004-2008**

No.	KRITERIA PENELITIAN	BOBOT	REALISASI				
			2004	2005	2006	2007	2008
<b>I</b>	<b>ASPEK KEUANGAN</b>						
1.	Return On Equity (ROE)	20	20	5,5	0	0	0
2.	Return On Investment (ROI)	15	15	3,77	0	4	3
3.	Cash Ratio (CR)	5	0	2	0	0	0
4.	Current Rasio (CuR)	5	0	5	5	4	4
5.	Collection Period (CP)	5	3,5	3	0	1,8	0,6
6.	Inventory Turnover (ITO)	5	5	5	4,5	5	5
7.	Total Asset Turnover (TATO)	5	1,5	2,5	2	2	1,5
8.	Total Modal Sendiri (TMS-TA)	10	4	4	4	0	0
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>30,77</b>	<b>15,2</b>	<b>19,8</b>	<b>14,1</b>
<b>II</b>	<b>ASPEK OPERASIONAL</b>						
1.	Produktivitas tenaga kerja	3	3	3	1	3	3
2.	Produktivitas konstruksi baja	3	3	3	3	2	2
3.	Delivery day (DVD)	1	1	1	1	1	1
4.	Produktivitas tenaga kerja - Pekerjaan Reparasi - Pekerjaan Bagunan Baru	2	2	2	2	2	2
5.	Pendapatan Rata-rata perkapal	3	3	3	2	2	2
6.	Aspek dinamis	3	3	3	3	3	3
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>III</b>	<b>ASPEK ADMINISTRASI</b>						
1.	Laporan Perhitungan Tahunan	3	3	3	3	2	2
2.	Rancangan RKAP	3	3	3	3	3	3
3.	Laporan Periodik	3	3	3	3	3	3
4.	Kinerja PUKK/CSR - efektivitas penyaluran - tkt kolektibilitas pengambilan pinjam	3 3	3 3	3 3	0 3	0 0	0 0
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>IV</b>	<b>TOTAL SKOR</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>60,77</b>	<b>36,2</b>	<b>40,8</b>	<b>35,1</b>
<b>V</b>	<b>TINGKAT KESEHATAN</b>		<b>AA</b>	<b>BBB</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>

Sumber : Laporan Keuangan, Laporan hasil evaluasi kinerja, dan wawancara lisan

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Balanced Scorecard* sebagai salah satu alternatif pengukuran kinerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan SK Meneg Nomor KEP-100/M-BUMN/2002, kinerja manajemen PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di tahun 2004 Tingkat Kesehatan Perusahaan "SEHAT dengan nilai AA dengan total skor 80", di setiap aspek dari aspek keuangan = 50, aspek operasional = 15, dan aspek administrasi = 15 dan tahun 2005 kebawah semakin menurun, sehingga pada tahun 2008 aspek keuangan memperoleh = 14,1, aspek operasional = 13, dan aspek administrasi = 8. Oleh sebab itu, Tingkat kesehatan tahun 2008 tergolong "KURANG SEHAT dengan nilai B dengan skor total 35,1".
- b. Aspek keuangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar dari tahun 2004-2008 mengalami penurunan. Ini berarti kinerja aspek keuangan dari tahun 2004-2008 semakin menurun dari skor 50, pada tahun 2008 menjadi

14,1, terjadi penurunan skor 35,9 dari total bobot skor yang dipersyaratkan yaitu 70 sehingga di tahun 2008 hasilnya tidak maksimal untuk nilai kinerja aspek ini yang disebabkan karena kurangnya kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar dalam tahun 2008, untuk menghasilkan pendapatan.

- c. Aspek operasional dari tahun 2004-2005 itu mencapai nilai optimal sesuai SK Meneg BUMN, tahun 2006 menurun sehingga mencapai skor 12 tetapi tahun 2007-2008 naik 1 skor sehingga mencapai skor 13. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan tenaga kerja dan pendapatan per proyek belum mampu mencapai tingkat yang distandarkan yaitu 15.
- d. Aspek administrasi di tahun 2006 menurun sehingga di tahun 2008 juga menurun dari skor 9 ke skor 8, karena hampir semua indikator tidak mengalami perubahan yang signifikan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran penulis yang dapat diberikan kepada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, guna menciptakan kinerja di masa yang akan baik keuangan maupun non keuangan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk kinerja keuangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tahun 2004-2008 semakin menurun dari tahun ke tahun sehingga tidak memaksimalkan nilai kinerja aspek ini, dikarenakan dari laporan keuangan

yang dimiliki ternyata selama tahun 2008 perusahaan mengalami kerugian diakibatkan struktur laporan keuangan yang negatif yang akan mempersulit perkembangan usaha perusahaan dan membebani kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus terus-menerus berusaha meningkatkan kinerjanya ditahun - tahun yang akan datang agar tingkat kesehatan perusahaan semakin membaik.

- b. Perusahaan harus berupaya melakukan penagihan piutang untuk mengatasi kesulitan modal kerja.
- c. Perusahaan harus berupaya mencari pinjaman dana dari pemerintah untuk memperbaiki semua aspek kinerja perusahaan.
- d. Perlu diadakan restrukturisasi pada perusahaan.
- e. Perlu pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam merubah citra (*image*) perusahaan kearah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Atkinson, Anthony A., Rajiv D. Banker, Robert S. Norton, Kaplan, David P. Kaplan, Mark Young. 2001. *Management Accounting*, Third edition. Prentice Hall. New Jersey.

Horngren, Foster, and Datar, *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, Seventh edition, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall International, 1997.

[http://fransloboanderson.wordpress.com/analisis kinerja keuangan](http://fransloboanderson.wordpress.com/analisis%20kinerja%20keuangan). 2007.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

Keputusan Badan Usaha Milik Negara, SK Meneg Nomor KEP-100/M-BUMN/2002.

Mulyadi, 2001. *Akuntansi Manajemen*, Edisi ke-3, Cetakan ke-3, Jakarta: Salemba Empat

Munawir, 1988. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi ke-3, Cetakan ke-1, Yogyakarta : LIBERTI YOGYAKARTA

Narletto. 2004. "Penilaian Kinerja PT. (Persero) Kawasan Industri Makassar". Skripsi Jurusan Akuntansi UNHAS

# LAMPIRAN

**PT. (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2004 dan 2003**  
(Dalam rupiah penuh)

<b>AKTIVA</b>	<b>Cat.</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
Kas	3	512.288.116,02	573.130.282,36
Bank	4	3.020.357.997,00	4.960.943.079,29
Deposito	5	1.000.000.000,00	-
Piutang Usaha	2,6. Lamp.1	30.948.499.850,53	26.757.751.777,05
Penyisihan Piutang Usaha		(13.981.253,36)	(13.043.361,05)
Piutang Belum Difakturkan	2,7	27.673.167.804,99	27.673.167.804,99
Piutang Karyawan	8	373.255.708,00	332.039.208,00
Uang Muka Pembelian	9	2.558.561.232,56	360.217.750,00
Uang Muka Pajak	10	3.222.680.058,33	3.364.731.557,25
Uang Muka Lain-lain	11	125.405.020,69	46.505.020,69
Persediaan Bahan Utama / Bantu	2,12	7.487.634.440,20	3.061.834.830,02
Biaya Dibayar Dimuka	2,13	398.561.966,00	206.226.720,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>77.306.430.940,96</b>	<b>67.323.504.668,60</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>			
Aktiva Tetap	2,14 Lamp.2	153.407.676.471,22	148.621.528.268,23
Akumulasi Penyusutan		(43.990.956.358,18)	(39.612.034.607,50)
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>109.416.720.113,04</b>	<b>109.009.493.660,73</b>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>			
Aktiva Dalam Konstruksi	15	1.973.900.000,00	28.807.588,00
Biaya Ditangguhkan	2	30.850.956.675,03	8.310.352.602,13
Amortisasi Blaya Ditangguhkan		(6.966.479.957,27)	(6.518.522.408,98)
Piutang Ragu-Ragu		187.817.945,95	187.817.945,95
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu		(112.503.705,00)	(93.721.911,00)
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>25.933.690.958,71</b>	<b>1.914.733.816,10</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>212.656.842.012,71</b>	<b>178.247.732.145,43</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT. (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2004 dan 2003**  
(Dalam rupiah penuh)

<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>Cat.</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Hutang Dagang	16. Lamp.3	4.996.556.140,94	4.207.962.027,37
Hutang Pajak	17	987.912.981,49	950.582.941,79
Hutang Sub Kontraktor	18. Lamp.4	1.822.483.124,80	1.067.140.039,80
Biaya YMH Dibayar	19	1.847.389.051,58	1.783.057.371,16
Kredit Bank Jangka Pendek	20	13.505.594.009,34	6.040.895.000,00
Hutang Lain-lain	21	2.469.482.563,34	2.253.107.071,24
Hutang RDI Jangka Pendek	22	104.856.679.612,33	76.267.136.234,96
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>130.486.097.483,82</b>	<b>92.569.880.686,32</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Kredit Bank Jangka Panjang	23	6.120.000.000,00	6.410.369.335,85
Hutang RDI Eks Spanyol	24	66.191.841.347,65	71.304.987.070,40
<b>Jumlah Kewajiban Jk. Panjang</b>		<b>72.311.841.347,65</b>	<b>77.715.356.406,25</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Disetor	25	3.521.000.000,00	3.521.000.000,00
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap		53.173.543.187,06	53.173.543.187,06
Cadangan Modal		335.137.028,05	335.137.028,05
Laba (Rugi) s/d Tahun Lalu	27	(49.190.185.162,25)	(53.086.687.006,48)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	28	2.019.408.128,38	4.019.501.844,23
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>9.858.903.181,24</b>	<b>7.962.495.052,86</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>		<b>212.656.842.012,71</b>	<b>178.247.732.145,43</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2004  
 (Dengan Perbandingan Angka-Angka Tahun 2003)  
 (Dalam rupiah penuh)

	Cat.	2004	2003
<b>PENJUALAN</b>			
Reparasi Kapal	2,29		
Bangunan Baru		29.713.523.484,00	24.892.034.899,00
Diversifikasi Usaha		45.723.111.871,00	47.656.630.229,00
Jumlah Penjualan		1.993.935.455,00	2.169.500.726,45
		<b>77.430.570.810,00</b>	<b>74.718.165.854,45</b>
<b>BIAYA PRODUKSI</b>			
Jumlah Biaya Produksi Langsung	2,30		
Material		37.958.146.491,45	30.770.233.149,05
Upah / Biaya Subkontraktor		9.470.353.767,53	9.218.907.226,92
Jumlah biaya Produksi Langsung		47.428.500.258,98	39.989.140.375,97
Jumlah Biaya Produksi Tidak Langsung			
Biaya Produksi Tdk Langsung Lain		4.511.210.301,00	3.668.977.585,93
Biaya Overhead Pabrik		6.171.196.550,44	10.258.137.877,63
Jumlah biaya Produksi Tidak Langsung		10.682.406.851,44	13.927.115.463,56
<b>JUMLAH BIAYA PRODUKSI</b>		<b>58.110.907.110,42</b>	<b>53.916.255.839,53</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>19.319.663.699,58</b>	<b>20.801.910.014,92</b>
<b>BIAYA USAHA</b>			
Biaya Pemasaran	31. Lamp.5	646.143.989,18	1.641.367.513,55
Biaya Administrasi / Umum	32. Lamp.6	11.118.471.271,24	8.968.298.780,13
<b>JUMLAH BIAYA USAHA</b>		<b>11.764.615.260,42</b>	<b>10.609.666.293,68</b>
<b>LABA SEBELUM BUNGA</b>		<b>7.555.048.439,16</b>	<b>10.192.243.721,24</b>
<b>BIAYA BUNGA KREDIT</b>	33	6.488.268.234,10	5.930.932.034,18
<b>LABA USAHA</b>		<b>1.066.780.205,06</b>	<b>4.261.311.687,06</b>
<b>PENDAPATAN / BIAYA LAIN-LAIN</b>	34		
Pendapatan Lain-lain		4.530.158.182,40	7.635.079.897,70
Biaya Lain-lain		3.577.530.259,08	7.876.889.740,53
Jumlah Pendapatan / Biaya Lain-lain		952.627.923,32	(241.809.842,83)
<b>LABA SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>2.019.408.128,38</b>	<b>4.019.501.844,23</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	35	-	-
<b>LABA / RUGI SEBELUM PAJAK</b>		<b>2.019.408.128,38</b>	<b>4.019.501.844,23</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		-	-
<b>LABA / RUGI SETELAH PAJAK</b>		<b>2.019.408.128,38</b>	<b>4.019.501.844,23</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA  
 LAPORAN ARUS KAS  
 Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2004  
 (Dengan Perbandingan Angka-Angka Tahun 2003)  
 (Dalam rupiah penuh)

	2004	2003
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba (Rugi) Bersih	2.019.408.128,38	4.019.501.844,23
Penyesuaian untuk		
- Penyusutan	4.378.921.750,68	4.866.937.496,11
- Penyisihan	19.719.686,31	(1.030.659,55)
- Amortisasi	447.957.548,29	272.319.165,34
- Jasa Giro	(52.180.367,35)	(41.805.420,00)
	<b>4.794.418.617,93</b>	<b>5.096.420.581,90</b>
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	6.813.826.746,31	9.115.922.426,13
- Kenaikan / Penurunan Piutang dan Uang Muka	(6.559.491.803,12)	(6.231.867.114,41)
- Kenaikan / Penurunan Hutang	1.861.974.410,79	(232.621.404,20)
- Kenaikan / Penurunan Persediaan	(4.425.799.610,18)	860.482.214,50
	<b>(9.123.317.002,51)</b>	<b>(5.604.006.304,11)</b>
Kas dihasilkan dari operasi	(2.309.490.256,20)	3.511.916.122,02
Penerimaan Jasa Giro	52.180.367,35	41.805.420,00
	52.180.367,35	41.805.420,00
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(2.257.309.888,85)</b>	<b>3.553.721.542,02</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penambahan Aktiva Tetap	(4.786.148.202,99)	(5.638.979.943,27)
Penambahan Aktiva Tetap dalam Konstruksi	(1.945.092.412,00)	82.714.931,45
Penambahan Biaya Ditangguhkan	(22.540.604.072,90)	(750.679.467,17)
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(29.271.844.687,89)</b>	<b>(6.306.944.478,99)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kenaikan Pinjaman Bank	7.174.329.673,49	1.850.229.669,16
Penurunan Pinjaman ex Peralatan Spanyol	23.476.397.654,62	316.742.385,20
Penurunan Hutang Jangka Panjang Lainnya		
Penurunan Laba (Rugi) s/d Tahun Lalu	(123.000.000,00)	(50.000.000,00)
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>30.527.727.328,11</b>	<b>2.116.972.054,36</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>(1.001.427.248,63)</b>	<b>(636.250.882,61)</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Awal Periode</b>	<b>5.534.073.361,65</b>	<b>6.170.324.244,26</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode</b>	<b>4.532.646.113,02</b>	<b>5.534.073.361,65</b>

PT (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 Untuk Tahun Berakhir Per 31 Desember 2004  
 (Dengan Perbandingan Angka-Angka Tahun 2003)  
 (Dalam rupiah penuh)

Uraian	Modal (Rp)	Cadangan Umum (Rp)	Saldo Laba (Rp)	Jumlah (Rp)
1 Saldo 31 Desember 2002	56.694.543.187,06	335.137.028,05	(53.036.687.006,48)	3.992.993.208,63
Pembagian laba tahun lalu :				
- Dividen				-
- Cadangan Umum				-
- Tantem				-
- Dana PUKK			(50.000.000,00)	(50.000.000,00)
Tambahan (pengurangan) modal				-
Tambahan (pengurangan) cadangan				-
Koreksi obrk / audit				-
Laba (Rugi) tahun 2003			4.019.501.844,23	4.019.501.844,23
2 Saldo 31 Desember 2003	56.694.543.187,06	335.137.028,05	(49.067.185.162,25)	7.962.495.052,86
Pembagian laba tahun lalu :				
- Dividen				-
- Cadangan Umum				-
- Tantem				-
- Dana PUKK			(123.000.000,00)	(123.000.000,00)
Tambahan (pengurangan) modal				-
Tambahan (pengurangan) cadangan				-
Koreksi obrk / audit				-
Laba (Rugi) tahun 2004			2.019.408.128,38	2.019.408.128,38
Saldo 31 Desember 2004	56.694.543.187,06	335.137.028,05	(47.170.777.033,87)	9.858.903.181,24

Uraian atas laporan keuangan yang tidak tersajikan dari laporan keuangan secara keseluruhan

(PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA  
 RAKA  
 31 Desember 2006 dan 2005  
 (dalam rupiah penuh)

AKTIVA	Cat.	2006	2005
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3	550.218.220	4.097.768.404
Piutang Usaha	2c,4	26.899.742.517	27.426.648.192
Penyisihan Piutang Usaha		(141.291.444)	(27.456.032)
Piutang Belum Difakturkan	2d,5	-	7.500.000.000
Piutang Karyawan	6	349.442.643	544.674.202
Uang Muka Pembelian	7	1.057.246.817	1.725.976.114
Uang Muka Pajak	8	3.613.032.941	3.607.873.011
Uang Muka Lain-lain	9	46.505.021	76.375.631
Persediaan Kapal	2e,10	31.173.167.805	31.173.167.805
Persediaan Bahan Utama / Bantu	2e,11	5.495.138.110	4.916.857.996
Biaya Dibayar Dimuka	12	1.525.083.347	1.038.340.463
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>70.568.285.976</b>	<b>82.080.225.786</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>			
Aktiva Tetap	2f, 13	160.555.852.540	159.264.939.527
Akumulasi Penyusutan		(51.834.283.768)	(48.129.908.243)
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		<b>108.721.568.772</b>	<b>111.135.031.284</b>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>			
Aktiva Dalam Konstruksi	2g, 14	15.817.250	-
Biaya Ditangguhkan		60.201.558.475	45.365.165.588
Amortisasi Biaya Ditangguhkan		(7.936.052.976)	(7.319.520.296)
Piutang Ragu-Ragu		187.817.946	187.817.946
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu		(138.816.924)	(120.035.129)
<b>Jumlah Aktiva Lain-Lain</b>		<b>52.330.323.771</b>	<b>38.113.428.108</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>231.620.178.518</b>	<b>231.328.685.178</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT. (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2006 dan 2005**  
(Dalam rupiah penuh)

<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>Cat.</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Hutang Dagang				
Hutang Pajak	15		8.916.393.231	6.421.936.991
Hutang Sub Kontraktor	16		993.838.594	971.448.070
Biaya YMH Dibayar	17		966.557.816	1.231.247.040
Kredit Bank Jangka Pendek	18		1.951.961.514	2.051.872.045
Hutang Lain-lain	19		22.549.266.375	11.977.360.459
Hutang RDI Jangka Pendek	20		9.557.088.803	2.724.478.397
	21		6.150.363.963	5.582.002.957
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>			<b>51.085.470.297</b>	<b>30.960.345.961</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Kredit Bank Jangka Panjang	22			5.783.337.577
Hutang RDI EKs Spanyol	23		179.765.038.453	184.623.830.157
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>			<b>179.765.038.453</b>	<b>190.407.167.734</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal Disetor	24		3.521.000.000	3.521.000.000
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	24		53.173.543.187	53.173.543.187
Cadangan Modal	24		335.137.028	335.137.028
Laba (Rugi) Tahun Lalu	25		(47.068.508.732)	(47.170.777.034)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	26		(9.191.501.716)	102.268.302
<b>Jumlah Ekuitas</b>			<b>769.669.767</b>	<b>9.961.171.483</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			<b>231.620.178.518</b>	<b>231.328.685.178</b>

That catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005

(Dalam rupiah penuh)

	Cat.	2006	2005
<b>PENJUALAN</b>			
Reparasi Kapal	2b, 27		
Bangunan Baru		18.898.924.302	31.991.676.785
Diversifikasi Usaha		9.550.000.000	28.776.000.000
Jumlah Penjualan		1.031.156.060	1.237.033.000
		29.480.080.362	62.004.709.785
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Beban Produksi Langsung			
Material	2b, 28		
Upah / Beban Sub kontraktor		13.298.906.887	26.492.906.886
Jumlah Beban Produksi Langsung		5.096.740.600	8.343.647.151
		18.395.647.488	34.836.554.037
Beban Produksi Tidak Langsung			
Beban Produksi Tidak Langsung Lain		4.550.024.509	4.190.924.369
Beban Overhead Pabrik		5.115.315.475	6.546.608.767
Jumlah Beban Produksi Tidak Langsung		9.665.339.984	10.737.533.136
Jumlah Harga Pokok Penjualan		28.060.987.472	45.574.087.173
<b>LABA KOTOR</b>		<b>1.419.092.890</b>	<b>16.430.622.612</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Penjualan	2b, 29	685.914.691	522.924.372
Beban Administrasi dan Umum	2b, 30	14.824.084.010	9.083.337.443
Jumlah Beban Usaha		15.509.998.701	9.606.261.815
<b>LABA (RUGI) SEBELUM BUNGA</b>		<b>(14.090.905.811)</b>	<b>6.824.360.797</b>
Beban Bunga	2b, 31	240.144.701	6.698.181.704
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>(14.331.050.512)</b>	<b>126.179.092</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Lain-lain	2b, 32	5.186.978.180	877.609.670
Beban Lain-lain		47.429.384	901.520.460
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		5.139.548.796	(23.910.790)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(9.191.501.716)</b>	<b>102.268.302</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>(9.191.501.716)</b>	<b>102.268.302</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>			
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>		<b>(9.191.501.716)</b>	<b>102.268.302</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005

(Dalam rupiah penuh)

Uraian	Modal	Cadangan Umum	Saldo Laba	Jumlah
Saldo 31 Desember 2004	56.694.543,187	335.137,028	(47.170.777,034)	9.858.903,181
Pembagian laba tahun lalu :				
- Dividen	-	-	-	-
- Cadangan Umum	-	-	-	-
- Tantiem	-	-	-	-
- Dana PUKK	-	-	-	-
Tambahan (pengurangan) modal	-	-	-	-
Tambahan (pengurangan) cadangan	-	-	-	-
Koreksi obrik / audit	-	-	-	-
Laba (Rugi) tahun 2005	-	-	102.268,302	102.268,302
Saldo 31 Desember 2005	56.694.543,187	335.137,028	(47.068.508,732)	9.961.171,483
Pembagian laba tahun lalu :				
- Dividen	-	-	-	-
- Cadangan Umum	-	-	-	-
- Tantiem	-	-	-	-
- Dana PUKK	-	-	-	-
Tambahan (pengurangan) modal	-	-	-	-
Tambahan (pengurangan) cadangan	-	-	-	-
Koreksi obrik / audit	-	-	-	-
Laba (Rugi) tahun 2006	-	-	(9.191.501,716)	(9.191.501,716)
Saldo 31 Desember 2006	56.694.543,187	335.137,028	(56.260.010,448)	769.669,767

**PT (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005

(Dalam rupiah penuh)

	2006	2005
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba (Rugi) Bersih		102.268.302
Penyesuaian untuk	(9.191.501.716)	
- Penyusutan		4.138.951.885
- Penyisihan	3.704.375.525	
- Amortisasi	132.617.207	21.006.203
- Jasa Giro	616.532.680	353.040.339
	(36.219.018)	(10.722.860)
	<b>4.417.306.393</b>	<b>4.502.275.566</b>
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	(4.774.195.322)	4.604.543.868
- Kenaikan / Penurunan Piutang dan Uang Muka	8.428.834.327	23.380.244.029
- Kenaikan / Penurunan Hutang	8.984.857.414	1.277.158.683
- Kenaikan / Penurunan Persediaan	(578.280.114)	(28.602.391.361)
	16.835.411.627	(3.944.988.649)
Kas dihasilkan dari operasi	12.061.216.305	659.555.219
Penerimaan Jasa Giro	36.219.018	10.722.860
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>12.097.435.323</b>	<b>670.278.079</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penambahan Aktiva Tetap	(1.290.913.012)	(5.857.263.055)
Penambahan Aktiva Tetap dalam Konstruksi	(15.817.250)	1.973.900.000
Penambahan Biaya Ditangguhkan	(14.836.392.887)	(14.514.208.913)
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(16.143.123.149)</b>	<b>(18.397.571.968)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kenaikan Pinjaman Bank	5.356.929.346	(1.864.895.973)
Penurunan Pinjaman ex Peralatan Spanyol	(4.858.791.704)	19.157.312.154
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>498.137.642</b>	<b>17.292.416.181</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>(3.547.550.184)</b>	<b>(434.877.709)</b>
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	4.097.768.404	4.532.646.113
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode</b>	<b>550.218.220</b>	<b>4.097.768.404</b>

PT. (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007**

	Notes	2008 Rp	2007 Rp
<b>AKTIVA</b>			
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	2d,3	1.633.589.069	1.356.259.299
Piutang Usaha	2c,e,4	27.407.446.805	23.180.782.123
Penyisihan Piutang Usaha	2e	(114.222.713)	(107.620.184)
Piutang Karyawan	2,5	332.727.733	390.323.270
Uang Muka Pembelian	6	1.340.734.503	1.093.246.817
Uang Muka Pajak	2k,7	3.627.871.340	3.624.160.559
Piutang Belum Difakturkan	8	31.173.167.805	31.173.167.805
Persediaan Bahan Utama/ Bantu	9	4.857.970.028	5.277.881.499
Biaya Dibayar Dimuka	2g,10	3.157.171.298	1.587.116.966
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>73.416.435.867</b>	<b>67.565.118.154</b>
<b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>			
Aktiva Tetap Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp58.007.235.353,- Tahun 2007 dan Sebesar Rp55.049.101.890,- Tahun 2006	2i,11	103.505.647.014	105.973.003.086
Aktiva Lain-lain	12	105.680.520.561	72.218.035.838
<b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>		<b>209.186.167.576</b>	<b>178.191.038.924</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>282.602.603.442</b>	<b>245.756.157.078</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban Lancar</b>			
Hutang Dagang	13	7.296.684.869	6.719.512.560
Hutang Pajak	2k,14	1.099.678.813	1.016.080.186
Hutang Sub Kontraktor	15	1.181.285.915	1.200.403.886
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	16	7.340.741.737	2.292.157.368
Kredit Bank Jangka Pendek	17	32.409.629.282	30.181.153.085
Hutang Lain-lain	18	10.758.014.896	11.411.553.414
Hutang RDI Jangka Pendek	19	6.331.397.994	6.331.397.994
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>66.417.433.496</b>	<b>59.152.258.493</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Kredit Bank Jangka Panjang	20	219.112.736.745	186.384.317.539
Hutang SLA Eks Spanyol		219.112.736.745	186.384.317.539
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>219.112.736.745</b>	<b>186.384.317.539</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Disetor	21	56.694.000.000	3.521.000.000
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	22	-	53.173.543.187
Cadangan Modal	23	335.680.215	335.137.028
Labai/ (Rugi) Ditahan	24	(56.810.099.169)	(56.260.010.448)
Labai/ (Rugi) Tahun Berjalan	25	(3.147.147.844)	(550.088.721)
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>(2.927.566.798)</b>	<b>219.581.046</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>		<b>282.602.603.442</b>	<b>245.756.157.078</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA  
 LAPORAN LABA RUGI  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

	Catatan	2008 Rp	2007 Rp
<b>PENJUALAN</b>			
	2b,26	36.654.763.932	36.501.825.323
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
	2b,27	29.433.166.209	28.985.184.123
<b>LABA KOTOR</b>		<u>7.221.597.723</u>	<u>7.516.641.200</u>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Penjualan	2b,28	903.100.662	1.044.825.428
Beban Administrasi dan Umum	2b,29	7.241.979.456	6.818.796.259
Jumlah Beban Usaha		<u>8.145.080.118</u>	<u>7.863.621.687</u>
Laba (Rugi) Sebelum Bunga (operasional)		<u>(923.482.395)</u>	<u>(346.980.487)</u>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	2b,30		
Pendapatan Lain-lain		24.634.606	434.929.409
Beban Lain-lain		2.248.300.055	638.037.643
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		<u>(2.223.665.449)</u>	<u>(203.108.234)</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<u>(3.147.147.844)</u>	<u>(550.088.721)</u>
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>		<u>(3.147.147.844)</u>	<u>(550.088.721)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

	<u>Modal Disetor</u> Rp	<u>Cadangan Umum</u> Rp	<u>Saldo Laba (Rugi)</u> Rp	<u>Jumlah Ekuitas</u> Rp
Saldo 1 Januari 2007	56.694.543.187	335.137.028	(56.260.010.448)	769.669.767
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	<u>(550.088.721)</u>	<u>(550.088.721)</u>
Saldo Per 31 Desember 2007	56.694.543.187	335.137.028	(56.810.099.169)	219.581.046
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	<u>(3.147.147.844)</u>	<u>(3.147.147.844)</u>
Saldo Per 31 Desember 2008	<u>56.694.543.187</u>	<u>335.137.028</u>	<u>(59.957.247.014)</u>	<u>(2.927.566.798)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT. (PERSERO) INDUSTRI KAPAL INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007**

Uraian	2008	2007
	Rp	Rp
<b>Arus kas dari kegiatan operasi :</b>		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(3.147.147.844)	(550.088.721)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas diperoleh dari ( digunakan untuk ) aktivitas operasi :		
Penyusutan	2.958.133.463	3.204.818.122
Amortisasi		94.103.296
<b>Perubahan aktiva dan kewajiban :</b>		
Piutang Usaha	(4.226.664.682)	3.718.960.393
Penyisihan Piutang Usaha	6.402.529	(33.471.260)
Piutang Karyawan	47.595.537	(30.880.627)
Uang Muka Pembelian	(247.487.686)	(36.000.000)
Uang Muka Pajak	(3.710.781)	(11.127.618)
Uang Muka Lain-lain	-	46.505.021
Persediaan Bahan Utama/ Bantu	419.911.471	217.256.611
Biaya Dibayar Dimuka	(1.570.054.332)	(62.033.619)
Piutang Belum Difakturkan	-	-
Hutang Dagang	577.172.309	(2.196.880.671)
Hutang Pajak	83.598.627	22.241.591
Hutang Sub Kontraktor	(19.117.971)	233.846.069
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5.048.584.369	340.195.853
Hutang Lain-lain	(653.538.529)	1.854.464.609
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasional</b>	<b>(726.323.520)</b>	<b>6.811.909.048</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :</b>		
Pembelian aktiva tetap	(490.777.392)	(466.252.435)
Penjualan aktiva net	-	-
Aktiva Lain-lain	(33.462.484.723)	(19.971.815.363)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>(33.953.262.115)</b>	<b>(20.438.067.798)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :</b>		
Hutang RDI Jangka Pendek	-	7.812.920.740
Kredit Bank Jangka Panjang	2.228.476.197	-
Hutang SLA Eks Spanyol	32.728.419.207	6.619.279.090
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>34.956.895.404</b>	<b>14.432.199.830</b>
Perubahan kas dan setara kas	277.309.770	806.041.079
Saldo kas dan setara kas awal	1.356.259.299	550.218.220
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR</b>	<b>1.633.569.069</b>	<b>1.356.259.299</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

**TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

6. Peraturan ...../2



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

**Pasal 2**

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**BAB II ...../3**



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

**BAB II  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

**Pasal 3**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
- a. SEHAT, yang terdiri dari :
    - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
    - AA apabila  $80 < TS < = 95$
    - A apabila  $65 < TS < = 80$
  - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
    - BBB apabila  $50 < TS < = 65$
    - BB apabila  $40 < TS < = 50$
    - B apabila  $30 < TS < = 40$
  - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
    - CCC apabila  $20 < TS < = 30$
    - CC apabila  $10 < TS < = 20$
    - C apabila  $TS < = 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
- a. Aspek Keuangan.
  - b. Aspek Operasional.
  - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 5**

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
  - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
  - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
  - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV  
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

**Pasal 7**

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**Pasal 8**

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

BAB V ...../5



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 04 Juni 2002

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**t t d**

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

**ttd**

Victor Hutapea  
NIP 060051008



Lampiran 1 : 1/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	<b>SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>	
		<b>Bidang Industri Pupuk dan Semen</b>
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Ascan Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		<b>Bidang Niaga</b>
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		<b>Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri</b>
		1. PT Bhandha Ghara Reksa
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambrics Primisima
		<b>Bidang Pertambangan dan Energi</b>
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		<b>Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan</b>
		1. PT Kertas Lece
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		<b>Bidang Industri Strategis</b>
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
<b>II.</b>	<b>SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI</b>	
		<b>Bidang Kawasan Industri</b>
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		<b>Bidang Konstruksi Bangunan</b>
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		<b>Bidang Konsultan Konstruksi</b>
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		<b>Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol</b>
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA</b>	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Laut</b>	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Udara</b>	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	<b>Bidang Sarana Perhubungan</b>	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		<b>Bidang Pos</b>
		1. PT Pos Indonesia
		<b>Bidang Pariwisata</b>
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		<b>Bidang Penyiaran</b>
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	<b>SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN</b>	
		<b>Bidang Perkebunan</b>
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



Lampiran I : 4/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		<b>Bidang Perikanan</b>
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		<b>Bidang Pertanian</b>
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		<b>Bidang Kehutanan</b>
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
<b>V.</b>	<b>SEKTOR PELAYANAN UMUM</b>	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Daruzi	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

**LAKSAMANA SUKARDI**



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 1/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

- Total bobot
  - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
  - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
- Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.  
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

- Metode Penilaian
  - Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$ROE : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - Aktiva tetap
  - Aktiva Non Produktif
  - Aktiva Lain-lain
  - Saham Penyertaan Langsung



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

**Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE**

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

**b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)**

**Rumus :**

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
  - Aktiva Tetap
  - Aktiva lain-lain
  - Aktiva Non Produktif
  - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Depleksi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 3/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} : \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 5/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	3,5	4,5
90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	3	4
75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	2,5	3,5
60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	2	3
40 < x ≤ 60	x ≤ 0	1,5	2,5
20 < x ≤ 40	x < 0	1	2
x ≤ 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} : \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**II. ASPEK OPERASIONAL**

1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh Indikator Aspek Operasional"

3. Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor =  $100\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan
- Baik (B) : skor =  $80\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan
- Cukup (C) : skor =  $50\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan
- Kurang (K) : skor =  $20\% \times$  Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**5. Mekanisme Penilaian**

**a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot**

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

**b. Mekanisme penetapan nilai**

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
<b>Total</b>	<b>25</b>		<b>35</b>	

III. ASPEK ADMINISTRASI

- Total Bobot
  - BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
  - BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15
- Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya  
Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

- Metode Penilaian
  - Laporan Perhitungan Tahunan
    - Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Penentuan nilai

**Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit**

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

**b. Rancangan RKAP**

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

**Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP**

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.  
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Penentuan nilai

*Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik*

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
$< 60$ hari	0

- Contoh Perhitungan  
Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x.
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.  
Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)  
- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

**Rumus :** 
$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
  - Saldo awal
  - Pengembalian pinjaman
  - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
  - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

*Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK*

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500
- Pengembalian pinjaman Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK Rp. 500

**Jumlah**

**Rp.10.000**



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana =  $9.500/10.000 \times 100\%$   
Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

**Rumus :** 
$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

- Lancar 100 %
- Kurang lancar 75 %
- Ragu-ragu 25 %
- Macet 0 %

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

*Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.*

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

**Contoh Perhitungan:**

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

**Jumlah** 3.000



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500	x 100 %	= 1.500
- Kurang lancar	500	x 75 %	= 375
- Ragu-ragu	800	x 25 %	= 225
- Macet	100	x 0 %	= 0

**Jumlah rata-rata tertimbang** **2.100**

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah  $\frac{2.100}{3000} \times 100\% = 70\%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

**IV. LAIN-LAIN**

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
  - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
  - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL**

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaikan kualitas sarana &amp; prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan.</li> <li>✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service)</li> <li>✓ Perbaikan mutu produk.</li> <li>✓ Pengembangan jalur distribusi.</li> <li>✓ Pelayanan gangguan/troubles.</li> <li>✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan.</li> <li>✓ Kecepatan pelayanan.</li> <li>✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan.</li> <li>✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa.</li> </ul>	<p>Pelabuhan</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>PLN</p> <p>Jalan Tol</p> <p>Garuda/MNA Bandara</p>	<p>Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb</p> <p>Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.</p> <p>Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.</p> <p>Kualitas jalan, indikator traffic sign.</p> <p>On time performance.</p> <p>Kebersihan terminal Bandara.</p>
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle.</li> <li>✓ Peningkatan rendemen.</li> <li>✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi.</li> <li>✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya.</li> <li>✓ Peningkatan nilai men-hour.</li> <li>✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi).</li> </ul>	<p>Perkebunan</p> <p>Kereta Api/pelayaran /penerbangan</p> <p>PLN</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>Konsultan</p> <p>Pertambangan</p>	<p>Rendemen, produksi per hektar, dsb.</p> <p>Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.</p> <p>Susut teknis, susut distribusi, dsb.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O &amp; P) Men-hour terjual, dsb.</p> <p>Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.</p>



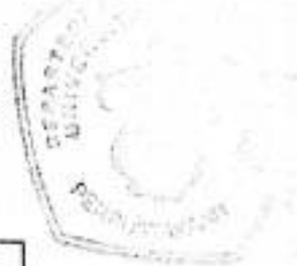
KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.</li><li>✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang.</li><li>✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum.</li><li>✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan.</li><li>✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.</li></ul>	Perkebunan  Pelabuhan  Transportasi	Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif. Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur /kolam, dsb. Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.</li><li>✓ Penciptaan produk-produk baru</li><li>✓ Peningkatan penguasaan teknologi.</li></ul>	Kontraktor  Industri kimia dasar	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.  Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mutu diklat.</li><li>✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)</li></ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan. Kaderisasi pimpinan. Peningkatan kesejahteraan Kepedulian manajemen terhadap R & D.
6. Research & Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pengembangan metode baru yang prospektif.</li><li>✓ Hasil riset yang bermanfaat.</li><li>✓ Perhatian perusahaan terhadap R &amp; D.</li></ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pencapaian sasaran.</li><li>✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran.</li><li>✓ Perhatian terhadap manajemen keberhasilan penugasan.</li></ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.



Lampiran II : 18/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	✓ Kebersihan lingkungan. ✓ Pelaksanaan AMDAL. ✓ Reklamasi. ✓ Estate regulation.	Berlaku umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

**LAKSAMANA SUKARDI**